

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Kajian Pengaruh Etika Wirausaha terhadap Jiwa Kewirausahaan

Nilai yang dipegang individu menjadi titik awal dalam memahami perilaku kewirausahaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa etika wirausaha memengaruhi cara seseorang memaknai aktivitas usaha dan menentukan sikap ketika berhadapan dengan pilihan ekonomi. Penelitian pada mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi memperlihatkan bahwa internalisasi etika berkaitan dengan kesiapan berwirausaha, terutama dalam keberanian memulai usaha dan komitmen menjalankan kegiatan bisnis secara mandiri (Wijaya & Ngadiyono, 2018:50; Juwarso et al., 2022:299). Pemahaman ini sejalan dengan ajaran Buddha yang menekankan bahwa kualitas tindakan seseorang ditentukan oleh kondisi batin dan niat yang melandasinya, sehingga keputusan yang lahir dari pikiran yang tidak terkendali dapat menimbulkan akibat merugikan, sedangkan tindakan yang didasari kesadaran cenderung membawa manfaat (*Dh.1–2*).

Landasan nilai tersebut menjadi lebih jelas ketika dikaitkan dengan proses pembentukan karakter melalui pendidikan berbasis nilai. Pendidikan yang menekankan tanggung jawab dan integritas berkaitan

dengan konsistensi perilaku serta orientasi jangka panjang dalam menjalankan usaha (Herman, 2024:34; Sunarni, 2023:120). Integrasi nilai etika Buddhis dalam proses pembelajaran melalui pendekatan berbasis tugas terbukti mampu meningkatkan kreativitas, refleksi kritis, serta internalisasi nilai moral peserta didik secara lebih efektif (Sukodoyo et al., 2025:35). Herman (2024:37) menegaskan bahwa penanaman nilai etika secara konsisten dalam lingkungan pendidikan berkontribusi pada kemantapan sikap dan kualitas pengambilan keputusan mahasiswa dalam konteks ekonomi dan sosial. Dalam perspektif Buddhis, moralitas tidak hanya dipahami sebagai tuntutan normatif, tetapi sebagai bagian dari kualitas yang mengarah pada kesejahteraan hidup. Ajaran Buddha menegaskan bahwa moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan merupakan dasar yang mengarahkan individu pada kebahagiaan baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan mendatang (A.IV.285).

Implikasi etika tersebut tampak pada cara individu menghadapi risiko dan ketidakpastian usaha. Ketika etika dijadikan dasar pengambilan keputusan, pelaku usaha menunjukkan ketahanan yang lebih baik saat menghadapi tekanan dan perubahan pasar (Sunarni, 2023:120; Juwarso et al., 2022:299). Ketahanan ini tidak hanya berkaitan dengan keberanian bertindak, tetapi juga kemampuan menahan dorongan jangka pendek yang dapat menjerumuskan pada keputusan impulsif. Ajaran Buddha menekankan bahwa kewaspadaan dan tanggung jawab pribadi perlu

dikembangkan agar seseorang tidak terjebak dalam kelengahan yang merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain (*Dh.276*).

Ketahanan menghadapi risiko pada akhirnya berkembang seiring terbentuknya disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari perilaku kewirausahaan. Individu dengan orientasi etis yang lebih kuat menunjukkan konsistensi perilaku dan ketekunan yang lebih tinggi dalam menjalankan aktivitas usaha (Juwarso et al., 2022:299; Ng, 2019:47). Văduva (2023:54-56) menjelaskan bahwa konsistensi etika berkaitan dengan stabilitas sikap individu dalam menghadapi tekanan dan kegagalan, yang merupakan bagian penting dari kualitas jiwa kewirausahaan. Stabilitas ini menjadi modal penting karena jiwa kewirausahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menemukan peluang, tetapi juga oleh kemampuan menjaga arah tindakan ketika berhadapan dengan perubahan situasi yang tidak selalu menguntungkan.

Konsistensi perilaku yang terbentuk melalui etika kemudian tercermin dalam relasi usaha dengan lingkungan pasar. Praktik usaha yang dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan dan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha (Ng, 2019:47; Liu et al., 2022:2). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Buddha yang menempatkan relasi sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan ekonomi. Dalam *Sigālovāda Sutta* dijelaskan bahwa hubungan sosial-profesional perlu dijalankan melalui keseimbangan hak dan kewajiban, penghormatan, serta

tanggung jawab yang saling dijaga agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis (*D.III.189*).

Temuan mengenai pentingnya kepercayaan dan konsistensi juga muncul dalam kajian usaha kecil dan menengah. Kejujuran dan integritas sebagai unsur etika wirausaha berkaitan dengan kinerja dan keberlanjutan usaha, terutama dalam pengambilan keputusan jangka panjang yang lebih rasional dan konsisten (Makhbul & Hasun, 2010:119; Sunarni, 2023:120). Sutarno (2018:28-30) menegaskan bahwa etika dalam aktivitas ekonomi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan yang menjaga keberlanjutan usaha sekaligus keharmonisan hubungan sosial di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun reputasi dan stabilitas usaha.

Pendekatan etika dalam kajian perilaku dan penalaran moral memperkuat pemahaman tersebut. Orientasi etis individu berkaitan dengan komitmen dan keberanian mengambil keputusan dalam situasi yang mengandung dilema moral (Caillier, 2016:884). Rode et al. (2015: 10359) menunjukkan bahwa tingkat penalaran moral memengaruhi cara individu menilai risiko, kepentingan pribadi, dan tanggung jawab sosial dalam tindakan ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa etika tidak hanya membentuk perilaku permukaan, tetapi memengaruhi kualitas pertimbangan individu yang menjadi dasar munculnya tindakan kewirausahaan yang bertanggung jawab.

Dalam perspektif Buddhis, keseluruhan proses tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari praktik kehidupan bermoral. Ajaran Buddha menempatkan tindakan ekonomi dalam kerangka kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial dapat dijaga melalui tindakan yang selaras dengan kebajikan (*A.IV.285; D.III.189*). Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa etika Buddhis dapat berfungsi sebagai landasan perilaku ekonomi yang mendukung orientasi jangka panjang dan stabilitas sosial (Wijoyo & Nyanasuryanadi, 2020:87).

2. Kajian Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Buddhis terhadap Jiwa Kewirausahaan

Perilaku kepemimpinan sering dipahami sebagai salah satu faktor yang membentuk cara individu bersikap, mengambil keputusan, dan menilai tanggung jawab. Dalam lingkungan pendidikan, figur pemimpin menjadi rujukan perilaku yang diamati secara langsung oleh mahasiswa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis nilai berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan diri, inisiatif, dan kesiapan individu untuk mengambil peran aktif, termasuk dalam aktivitas kewirausahaan (Xu et al., 2022:1202; Lie et al., 2024:855). Temuan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak hanya membentuk sistem organisasi, tetapi juga membangun kondisi psikologis individu yang mendorong keberanian mengambil peluang.

Pengaruh kepemimpinan tersebut tidak berhenti pada aspek perilaku yang tampak, tetapi masuk pada pembentukan sikap internal. Lingkungan yang menampilkan pemimpin yang adil, terbuka, dan konsisten memberikan pengalaman belajar yang membentuk keberanian mengambil keputusan serta kesadaran terhadap konsekuensi tindakan (Herman, 2024:36; Sutarno, 2018:28). Melalui proses ini, kepemimpinan berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai, karena mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep moralitas secara teoretis, tetapi juga menyaksikan penerapannya dalam tindakan nyata.

Aspek lain yang sering dikaitkan dengan perilaku kepemimpinan adalah cara individu memaknai risiko dan ketidakpastian. Kepemimpinan yang menunjukkan ketenangan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri memberikan contoh konkret dalam menghadapi tekanan dan situasi yang tidak pasti. Kajian empiris menunjukkan bahwa pola kepemimpinan semacam ini berkaitan dengan meningkatnya kemampuan individu menghadapi risiko secara rasional dan proporsional (Vajpayee, 2024:77; Vallabh & Singhal, 2014:768). Dengan demikian, kepemimpinan yang stabil dapat menjadi sumber pembelajaran psikologis yang membentuk kesiapan mahasiswa menghadapi ketidakpastian usaha.

Pandangan mengenai kepemimpinan tersebut memperoleh dasar normatif yang kuat dalam perspektif Buddhis. Ajaran Buddha menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh kualitas Dhamma yang dijalankan, sehingga tindakan bermoral

menjadi ukuran utama dalam menilai kualitas manusia (*D.III.83*). Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam konteks Buddhis bukan sekadar otoritas struktural, melainkan tanggung jawab moral yang dituntut untuk memberikan manfaat bagi komunitas.

Penekanan pada tanggung jawab moral pemimpin juga terlihat dalam ajaran yang menempatkan moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan sebagai fondasi kesejahteraan hidup. Ajaran Buddha menjelaskan bahwa kualitas-kualitas tersebut mengarahkan individu pada kebahagiaan yang seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan mendatang (*A.IV.285*). Hal ini memperkuat pemahaman bahwa kepemimpinan Buddhis seharusnya tidak hanya menghasilkan efisiensi organisasi, tetapi membangun lingkungan yang mendorong perkembangan karakter dan kebajikan.

Kajian kontemporer mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa kepemimpinan Buddhis berkaitan dengan kemampuan individu mengelola emosi, konflik, dan tekanan. Xu et al. (2022:1203) menemukan bahwa kepemimpinan yang dipengaruhi nilai Buddhis berkorelasi dengan perilaku inovatif dan orientasi keberlanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa nilai Buddhis dalam kepemimpinan memiliki relevansi praktis dalam membentuk sikap inovatif, yang merupakan unsur penting dalam jiwa kewirausahaan.

Dalam konteks pendidikan tinggi berbasis Buddhis, kepemimpinan tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai

sumber teladan nilai. Kepemimpinan yang menampilkan pelayanan, welas asih, dan kebijaksanaan membentuk iklim akademik yang mendorong mahasiswa mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan keberanian bertindak secara mandiri (Herman, 2024:37; Sutarno, 2018:30). Pengalaman tersebut dapat menjadi faktor yang memperkuat kesiapan mahasiswa untuk membangun usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial.

Ajaran Buddha juga menekankan pentingnya kesadaran dan niat dalam setiap tindakan. Tindakan yang dilakukan tanpa kebijaksanaan akan membawa penderitaan, sedangkan tindakan yang dilandasi niat benar dan pengendalian diri membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain (*Dh.1-2*). Prinsip ini memperkuat pemahaman bahwa perilaku kepemimpinan yang berakar pada kesadaran dan kebajikan dapat memengaruhi orientasi tindakan mahasiswa, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan kewirausahaan.

3. Kajian Pengaruh Etika Wirausaha dan Kepemimpinan Buddhis terhadap Jiwa Kewirausahaan

Jiwa kewirausahaan pada mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara nilai yang diyakini dan lingkungan sosial yang dialami. Etika wirausaha membentuk orientasi pribadi dalam memandang tanggung jawab, risiko, dan tujuan usaha, sementara kepemimpinan Buddhis hadir sebagai konteks yang menampilkan nilai tersebut dalam bentuk perilaku nyata. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa nilai etika

yang dipahami secara kognitif akan lebih mudah terinternalisasi ketika individu berada dalam lingkungan yang menampilkan keteladanan kepemimpinan yang konsisten (Herman, 2024:36; Juwarso et al., 2022:299). Dengan demikian, pembentukan jiwa kewirausahaan tidak hanya bergantung pada pemahaman nilai secara teoritis, tetapi juga pada pengalaman sosial yang menguatkan nilai tersebut.

Relasi antara nilai dan keteladanan ini menjelaskan mengapa etika wirausaha dan kepemimpinan tidak bekerja secara terpisah. Etika memberikan arah batin dalam mengambil keputusan, sedangkan kepemimpinan memberikan contoh konkret tentang bagaimana nilai diterapkan dalam situasi nyata. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang belajar dalam lingkungan dengan kepemimpinan berbasis nilai menunjukkan keberanian bertindak dan kepercayaan diri yang lebih stabil dibandingkan mereka yang hanya menerima pembelajaran normatif tanpa teladan perilaku (Xu et al., 2022:1202; Lie et al., 2024:855). Kondisi ini memperlihatkan bahwa internalisasi nilai etika lebih efektif ketika mahasiswa mengalami situasi nyata yang memperlihatkan konsistensi perilaku pemimpin.

Keterkaitan tersebut juga terlihat dalam cara mahasiswa memaknai risiko dan ketidakpastian. Etika membantu individu menilai batas moral dalam pengambilan keputusan, sementara kepemimpinan yang menampilkan ketenangan dan kebijaksanaan membentuk cara menghadapi tekanan tanpa reaksi impulsif. Lingkungan kepemimpinan semacam ini

berkaitan dengan kemampuan individu mengelola risiko secara rasional dan bertanggung jawab, yang merupakan bagian penting dari jiwa kewirausahaan (Vajpayee, 2024:77; Vallabh & Singhal, 2014:768). Dengan kata lain, etika memberi batas arah tindakan, sedangkan kepemimpinan memberi pola cara bertindak.

Dalam perspektif Buddhis, hubungan antara nilai pribadi dan perilaku pemimpin dipahami sebagai kesatuan antara batin dan tindakan. Ajaran Buddha menjelaskan bahwa pikiran dan niat mendahului setiap perbuatan, sehingga kualitas tindakan bergantung pada kondisi batin yang melandasinya (*Dh.1–2*). Prinsip ini menegaskan bahwa etika wirausaha yang bersumber dari kesadaran batin akan berkembang lebih kuat ketika didukung oleh kepemimpinan yang juga berakar pada kesadaran dan kebajikan.

Pemahaman tersebut dipertegas melalui ajaran yang menempatkan moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan sebagai fondasi kesejahteraan hidup. Ketika etika wirausaha dipadukan dengan kepemimpinan yang menampilkan tanggung jawab moral, mahasiswa tidak hanya belajar tentang keberanian berusaha, tetapi juga tentang arah tindakan usaha yang layak dijalankan secara etis dan berkelanjutan (*A.IV.285*). Hal ini memperkuat argumen bahwa jiwa kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan keberanian mengambil peluang, tetapi juga kemampuan menjaga nilai dan integritas dalam prosesnya.

Relasi sosial yang terbentuk dalam lingkungan kepemimpinan juga memengaruhi perkembangan jiwa kewirausahaan. *Sigālovāda Sutta* menjelaskan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan profesional, termasuk kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan dalam aktivitas sosial-ekonomi (*D.III.189*). Prinsip ini menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan tidak berkembang dalam ruang individual semata, melainkan melalui hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan dan integritas.

Kajian kontemporer memperlihatkan bahwa integrasi nilai etika dan kepemimpinan Buddhis berkaitan dengan orientasi kewirausahaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Mahasiswa yang mengalami pembelajaran nilai etika sekaligus menyaksikan praktik kepemimpinan berbasis kebajikan cenderung mengembangkan sikap kewirausahaan yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha (Wijoyo & Nyanasuryanadi, 2020:87; Sunarni, 2023:127). Perpaduan etika dan kepemimpinan dapat menjadi faktor yang membentuk karakter kewirausahaan yang lebih matang.

Hubungan antara etika wirausaha, kepemimpinan Buddhis, dan jiwa kewirausahaan terletak pada proses internalisasi nilai yang diperkuat oleh keteladanan perilaku. Etika membentuk orientasi batin dalam mengambil keputusan, kepemimpinan menyediakan konteks pembelajaran yang

nyata, dan jiwa kewirausahaan berkembang sebagai hasil interaksi keduanya dalam lingkungan pendidikan tinggi berbasis Buddhis.

B. Kerangka Teoritis

1. Jiwa Kewirausahaan

a. Landasan Konseptual Jiwa Kewirausahaan

Jiwa kewirausahaan merupakan seperangkat karakter, sikap, dan kemampuan yang mendorong individu untuk berani memulai usaha, mengelola ketidakpastian, serta menciptakan inovasi secara mandiri. Jiwa kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis dalam bisnis, tetapi juga mencakup motivasi internal, keberanian mengambil risiko, kreativitas, ketahanan menghadapi kegagalan, dan kemampuan membaca peluang secara realistis. Jiwa kewirausahaan berkembang sebagai bagian dari karakter psikologis individu yang terbentuk melalui pengalaman hidup, pendidikan, dan lingkungan sosial (Liu et al., 2022:3).

Perspektif teori klasik menjelaskan bahwa jiwa kewirausahaan berakar pada kebutuhan berprestasi yang tinggi (*need for achievement*). Individu yang memiliki dorongan berprestasi cenderung menetapkan tujuan yang menantang, bekerja keras untuk mencapainya, serta menunjukkan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Dorongan berprestasi ini menjadikan individu lebih berani mengambil keputusan dan lebih mampu mengarahkan dirinya pada pencapaian usaha (Natalia

et al., 2024:543; McClelland, 2016:259). Jiwa kewirausahaan juga dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan inovasi sebagai inti dari perubahan ekonomi. Inovasi menjadi ciri utama wirausahawan karena inovasi memungkinkan individu menciptakan nilai baru melalui produk, jasa, maupun strategi usaha yang berbeda dari pola sebelumnya (Schumpeter, 2021:4). Kemampuan kewirausahaan juga dapat dipandang sebagai praktik yang dapat dipelajari melalui pembiasaan etos kerja, disiplin, serta kemampuan mengelola ketidakpastian usaha (Drucker, 2014:175).

Perspektif teori modern memperlihatkan bahwa jiwa kewirausahaan bukan hanya persoalan inovasi dan motivasi, tetapi juga mencakup kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan ketahanan menghadapi tekanan. Dinamika pasar yang berubah cepat menuntut individu memiliki kemampuan menyesuaikan strategi, bertahan dalam situasi tidak pasti, dan tetap produktif ketika menghadapi kegagalan. Jiwa kewirausahaan dipahami sebagai konstruk multidimensi yang memuat motivasi, kreativitas, inovasi, keberanian mengambil risiko, serta resiliensi (Liu et al., 2022:3). Ketahanan tersebut semakin relevan karena kewirausahaan modern tidak dapat dilepaskan dari tantangan sosial dan keberlanjutan. Wirausahawan tidak hanya dihadapkan pada kompetisi pasar, tetapi juga pada tuntutan moral dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (Foucrier & Wiek, 2019:4).

b. Jiwa kewirausahaan dalam perspektif Buddhis

Jiwa kewirausahaan dalam perspektif Buddhis dipahami bukan hanya sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang usaha, mengelola bisnis, serta mengambil risiko untuk meraih keuntungan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kualitas batin yang diarahkan oleh moralitas dan kebijaksanaan. Aktivitas kewirausahaan dipandang sebagai bagian dari kehidupan duniawi yang sah untuk dijalankan, namun tidak boleh menjadi sarana memperkuat keserakahan, keterikatan, maupun perilaku ekonomi yang tidak etis. Buddhisme menegaskan bahwa kualitas kehidupan tidak semata ditentukan oleh pencapaian duniawi, melainkan oleh kemampuan individu menjalani kehidupan yang benar melalui pandangan benar, tindakan benar, serta penghidupan benar (*M.I.75*). Ekonomi Buddhis menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan *true well-being* atau peningkatan kualitas hidup, sehingga orientasinya tidak berhenti pada kepuasan konsumtif semata, melainkan pada kesejahteraan yang benar (Payutto, 2016:33).

Konsep jiwa kewirausahaan dalam perspektif Buddhis dapat dipahami secara lebih sistematis, sehingga konsep ini dijabarkan ke dalam beberapa dimensi utama. Dimensi-dimensi tersebut merupakan aspek konseptual yang menggambarkan bagaimana ajaran Buddhis membentuk orientasi usaha, pola pengambilan keputusan, serta sikap moral seorang wirausahawan. Adapun dimensi jiwa kewirausahaan dalam perspektif Buddhis meliputi enam aspek berikut.

1) Kesadaran Ketidakkekalan (*Anicca*) sebagai Dasar Orientasi Usaha Jangka Panjang

Ajaran Buddha mengajarkan bahwa semua fenomena kehidupan bersifat tidak kekal (*anicca*), sehingga manusia tidak semestinya melekat pada kekayaan, keberhasilan, maupun keuntungan sebagai sesuatu yang permanen (*M.I.75*). Kesadaran ini penting dalam kewirausahaan karena membantu pelaku usaha memahami bahwa kondisi pasar, persaingan, dan peluang usaha selalu berubah, sehingga strategi bisnis harus disusun dengan orientasi jangka panjang dan kesiapan beradaptasi. Harvey (2013:304) menekankan bahwa refleksi Buddhis terhadap ketidakkekalan mendorong individu untuk tidak membangun identitas diri melalui kepemilikan dan konsumsi, sehingga aktivitas ekonomi dapat dijalankan secara lebih rasional dan tidak impulsive.

Kesadaran *anicca* juga membentuk ketahanan mental (*resilience*) dalam kewirausahaan. Seorang pelaku usaha yang memahami ketidakkekalan akan lebih mampu menghadapi kegagalan dan perubahan tanpa kehilangan keseimbangan batin, karena menyadari bahwa naik-turunnya kondisi usaha adalah bagian alami dari dinamika kehidupan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Buddha bahwa kehidupan duniawi tidak pernah stabil dan selalu bergerak dalam perubahan, sehingga seseorang perlu mengembangkan kebijaksanaan dalam menghadapi kondisi yang

tidak pasti (*M.I.75*). Dalam ekonomi Buddhis, pemahaman tentang perubahan ini dipandang sebagai dasar pengelolaan usaha yang lebih stabil, sebab orientasi wirausaha tidak hanya diarahkan pada profit cepat, melainkan pada keberlanjutan dan keseimbangan hidup (Payutto, 2016:52).

2) Moralitas (*Sīla*) sebagai Pondasi Etika Kewirausahaan

Moralitas (*sīla*) dalam Buddhisme, merupakan landasan perilaku yang mencegah tindakan merugikan orang lain. Dalam konteks kewirausahaan, moralitas menjadi pedoman penting agar bisnis tidak dijalankan melalui cara-cara salah seperti penipuan, manipulasi, atau eksploitasi. Buddha menegaskan bahwa ucapan benar dan tindakan benar merupakan unsur penting dalam jalan mulia yang membentuk kehidupan yang bermoral (*M.I.75*). Keown (2005:70) menjelaskan bahwa etika Buddhis tidak hanya menilai tindakan dari hasil akhirnya, tetapi menilai dari niat (*cetana*) serta dampaknya terhadap penderitaan dan kesejahteraan makhluk lain, sehingga moralitas adalah fondasi utama dalam kehidupan sosial termasuk ekonomi.

Moralitas dalam kewirausahaan juga berfungsi membangun kepercayaan pelanggan dan reputasi bisnis. Dalam dunia usaha modern, reputasi sering menjadi modal sosial yang lebih kuat daripada sekadar modal finansial, karena konsumen cenderung memilih usaha yang dinilai jujur dan bertanggung jawab. Prinsip ini

sejalan dengan ajaran Buddha mengenai pentingnya menghindari ucapan salah dan mengembangkan ucapan benar sebagai bentuk tanggung jawab sosial (*M.I.75*). Studi Buddhis tentang *consumerism* menegaskan bahwa etika Buddhis mendorong praktik ekonomi yang lebih berorientasi pada tanggung jawab dan keseimbangan, bukan sekadar kompetisi dan dominasi pasar (Harvey 2013:348).

3) Pengendalian Diri terhadap Nafsu Keinginan (*Taṇhā*) dan Kecerakahan (*Lobha*)

Salah satu sumber utama penderitaan dalam ajaran Buddha adalah *taṇhā* atau nafsu keinginan yang tidak terkendali. Dalam kewirausahaan, dorongan mengejar keuntungan tanpa batas dapat melahirkan kecerakahan (*lobha*) yang kemudian mendorong tindakan tidak etis. Pengendalian diri merupakan kualitas penting agar pelaku usaha mampu mengelola ambisi dan tidak menjadikan profit sebagai satu-satunya orientasi hidup. Buddha menjelaskan bahwa kehendak benar harus meninggalkan kehendak salah yang didorong oleh nafsu indria dan permusuhan, sehingga aktivitas kehidupan harus diarahkan pada pengendalian batin (*M.I.72*). Harvey (2013:345) menegaskan bahwa Buddhisme secara kritis memandang budaya konsumsi modern yang menumbuhkan kecerakahan, sehingga pengendalian diri merupakan prinsip moral yang sangat relevan dalam aktivitas ekonomi.

Pengendalian diri juga membantu pelaku usaha menghindari keputusan impulsif seperti spekulasi ekstrem, manipulasi pasar, maupun pengeluaran yang tidak terukur. Dalam konteks Buddhis, usaha benar dan perhatian benar merupakan mekanisme untuk menjaga pikiran tetap terkendali agar keputusan diambil dengan kesadaran penuh, bukan dorongan emosional sesaat (*M.I.73*). Dalam ekonomi Buddhis, pengendalian keinginan dianggap sebagai syarat agar kekayaan tidak berubah menjadi sumber penderitaan, melainkan menjadi sarana kehidupan yang seimbang (Payutto, 2016:37).

4) Kebijakan (*Paññā*) dalam Pengambilan Keputusan Usaha

Kebijaksanaan atau *paññā* merupakan kemampuan memahami realitas secara benar dan melihat hubungan sebab-akibat dari suatu tindakan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman agar keputusan bisnis tidak hanya didasarkan pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral dan sosial yang lebih luas. Buddha membedakan pandangan benar yang mulia sebagai kebijakan yang melampaui keduniawian, sehingga seseorang mampu menilai tindakan secara lebih mendalam (*M.I.72-75*). Keown (2005:95) menjelaskan bahwa kebijakan dalam etika Buddhis adalah kemampuan memahami konsekuensi moral, sehingga tindakan ekonomi harus diarahkan pada pengurangan penderitaan dan peningkatan kesejahteraan bersama.

Kebijaksanaan juga membantu pelaku usaha memahami bahwa kekayaan hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Pelaku usaha tidak menjadikan keuntungan sebagai ukuran mutlak keberhasilan hidup, melainkan melihat usaha sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijalankan secara seimbang. Hal ini sejalan dengan ajaran Buddha bahwa kebijaksanaan merupakan faktor jalan yang menuntun pada pembebasan, bukan keterikatan baru (*M.I.72*). Payutto (2016:60) menegaskan bahwa ekonomi Buddhis memandang pertumbuhan ekonomi harus dikendalikan oleh kebijaksanaan agar tidak menimbulkan eksploitasi sosial maupun kerusakan nilai kemanusiaan.

5) Welas Asih (*Karuṇā*) dan Orientasi Sosial dalam Kewirausahaan

Welas asih atau *karuṇā* merupakan nilai penting dalam Buddhisme yang menekankan kepedulian terhadap penderitaan makhluk lain. Nilai ini membentuk orientasi sosial, yaitu usaha dijalankan tidak semata untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Buddha menekankan bahwa tindakan benar tidak hanya menahan diri dari perbuatan jahat, tetapi juga mengembangkan kebajikan yang membawa manfaat bagi kehidupan bersama (*M.I.75*). Xu et al. (2022:1205) menunjukkan bahwa wirausahawan yang dipengaruhi nilai Buddhis cenderung lebih terlibat dalam perilaku amal serta aktivitas kewirausahaan

sosial, sehingga welas asih dapat menjadi faktor penting dalam pembentukan kewirausahaan yang bertanggung jawab.

Welas asih dalam dunia bisnis juga tercermin dalam perlakuan adil terhadap pekerja, mitra usaha, serta konsumen. Usaha yang dijalankan dengan karuṇā tidak mengeksploitasi tenaga kerja, tidak merugikan pelanggan, serta lebih berorientasi pada pelayanan yang jujur. Hal ini sejalan dengan prinsip penghidupan benar, di mana aktivitas mencari nafkah harus dilakukan tanpa menimbulkan penderitaan bagi pihak lain (*M.I.75*). Essen (2010:12) menegaskan bahwa ekonomi Buddhis menempatkan kesejahteraan sosial sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, sehingga bisnis yang berorientasi welas asih dipandang lebih sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

6) Jalan Tengah (*Majjhimā Paṭipadā*) sebagai Prinsip Keseimbangan dalam Usaha

Ajaran Buddha mengajarkan jalan tengah (*majjhimā paṭipadā*), yaitu prinsip menghindari ekstremitas dalam kehidupan. Jalan tengah dapat dimaknai sebagai kemampuan menjaga keseimbangan antara kerja keras dan ketenangan batin, antara ekspansi usaha dan stabilitas, serta antara ambisi keuntungan dan tanggung jawab moral. Prinsip ini tercermin dalam ajaran bahwa unsur-unsur jalan mulia saling mendukung, sehingga kehidupan yang benar tidak dapat dibangun hanya dari satu aspek saja, tetapi harus terintegrasi (*M.I.76*). Jalan tengah dipahami sebagai konsep

moderasi ekonomi, yaitu menolak pola pertumbuhan yang berlebihan dan mendorong praktik usaha yang cukup, stabil, serta tidak eksploitatif (Payutto, 2016:74).

Konsep jalan tengah juga relevan dalam menjaga kesehatan mental dan keberlanjutan usaha. Pelaku usaha yang terlalu mengejar keuntungan sering mengalami tekanan psikologis dan kehilangan arah moral, sedangkan pelaku usaha yang terlalu takut mengambil risiko sulit berkembang. Jalan tengah menjadi prinsip strategis untuk menjaga keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Buddha bahwa jalan yang benar menghasilkan pengetahuan benar dan kebebasan benar sebagai hasil dari keseimbangan latihan (*M.I.76*). Essen (2010:9) menegaskan bahwa prinsip moderasi dalam ekonomi Buddhis berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketahanan individu maupun komunitas terhadap krisis ekonomi dan tekanan pasar modern.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jiwa Kewirausahaan

Jiwa kewirausahaan tidak hanya terbentuk dari karakter personal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan sistem pendidikan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah kekuatan dari dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk memulai, mempertahankan, dan mengembangkan aktivitas kewirausahaan. Faktor ini bersifat

psikologis dan personal, yang membentuk cara individu berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dalam menghadapi risiko usaha.

a) Motivasi Berprestasi (*Need for Achievement*)

Motivasi berprestasi merupakan dorongan psikologis untuk mencapai hasil terbaik, menetapkan target, dan memperoleh kepuasan dari pencapaian. Individu dengan motivasi berprestasi tinggi cenderung lebih aktif mencari peluang, lebih disiplin, dan lebih kuat dalam mempertahankan tujuan usaha. Motivasi ini menjadi dasar penting dalam membentuk jiwa kewirausahaan karena menumbuhkan orientasi kerja keras, kemandirian, dan keyakinan pada kemampuan diri (McClelland, 2016:259). Motivasi berprestasi juga terbukti relevan dalam konteks modern karena berkaitan dengan kreativitas dan pencapaian kinerja usaha (Makuya, 2024:4).

b) Kreativitas dan Kemampuan Berinovasi

Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan gagasan baru, sedangkan inovasi merupakan kemampuan menerapkan gagasan tersebut menjadi produk, proses, atau layanan yang bernilai. Kewirausahaan sangat erat dengan inovasi karena wirausahawan pada dasarnya menciptakan nilai baru melalui pembaruan dan diferensiasi. Inovasi dipandang sebagai inti dari kewirausahaan karena menjadi sumber daya saing dan keunggulan usaha (Schumpeter, 2021:4). Kreativitas juga dipengaruhi oleh dorongan berprestasi yang kuat karena individu termotivasi untuk menghasilkan cara baru dalam mencapai tujuan (Makuya, 2024:4).

c) Keberanian Mengambil Risiko dan Mengelola Ketidakpastian

Keberanian mengambil risiko merupakan kesiapan menghadapi ketidakpastian dalam keputusan usaha, baik risiko finansial, sosial, maupun risiko kegagalan. Jiwa kewirausahaan tidak mungkin berkembang tanpa keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan. Unsur risk-taking merupakan karakter penting dalam kewirausahaan modern karena usaha selalu bergerak dalam kondisi yang tidak sepenuhnya (Liu et al., 2022:3). Kewirausahaan juga dipahami sebagai praktik yang dapat dipelajari melalui pengalaman dalam mengelola ketidakpastian, sehingga individu perlu membangun kebiasaan berpikir realistis dan adaptif dalam mengambil keputusan (Drucker, 2014:175).

c) Disiplin, Konsistensi, dan Etos Kerja

Disiplin merupakan kemampuan mengelola waktu dan sumber daya secara terarah, sedangkan konsistensi adalah kemampuan mempertahankan tindakan usaha secara stabil meskipun menghadapi hambatan. Kewirausahaan bukan sekadar ide kreatif, tetapi menuntut ketekunan dan pengelolaan usaha secara terus-menerus. Jiwa kewirausahaan tumbuh kuat ketika individu mampu bekerja secara sistematis dan menjaga orientasi tujuan jangka panjang (Drucker, 2014:175). Dorongan berprestasi juga berperan dalam membentuk disiplin karena individu terdorong menjaga standar kerja dan mengejar pencapaian (McClelland, 2016:259).

d) Ketahanan Mental dan Resiliensi

Ketahanan mental adalah kemampuan menghadapi tekanan dan stres usaha, sedangkan resiliensi adalah kemampuan bangkit kembali setelah kegagalan. Jiwa kewirausahaan menuntut kemampuan untuk bertahan dalam

kondisi sulit karena dunia usaha penuh perubahan dan kompetisi. Unsur resiliensi menjadi bagian penting dalam kewirausahaan karena kegagalan sering menjadi bagian dari proses pembelajaran dan inovasi (Liu et al., 2022:3). Perspektif Buddhis memperkuat dimensi ini dengan menekankan bahwa kondisi kehidupan bersifat berubah dan tidak tetap, sehingga individu perlu memiliki ketahanan menghadapi dinamika duniawi (*S.V.II*).

e) Kepercayaan Diri dan Kemandirian

Kepercayaan diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya mengambil keputusan, memimpin tindakan, dan menyelesaikan masalah. Kemandirian berarti kemampuan bertindak tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak lain. Jiwa kewirausahaan membutuhkan keyakinan diri karena wirausahawan harus berani memulai sesuatu yang belum pasti berhasil. Dorongan berprestasi berperan membentuk kepercayaan diri karena individu terbiasa menghadapi tantangan dan mengevaluasi hasil pencapaiannya (McClelland, 2016:259). Proses pembelajaran dan pengalaman usaha juga memperkuat kepercayaan diri karena kewirausahaan merupakan praktik yang dapat dipelajari (Drucker, 2014:175).

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar diri individu yang memengaruhi peluang, dukungan, dan hambatan dalam membentuk jiwa kewirausahaan. Faktor ini dapat mempercepat pertumbuhan kewirausahaan apabila lingkungan memberikan akses pembelajaran, jejaring sosial, serta peluang pasar yang memadai.

a) Lingkungan Pendidikan dan Pembelajaran Praktik

Lingkungan pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk jiwa kewirausahaan karena perguruan tinggi dapat menjadi ruang pembentukan karakter, keterampilan, dan pengalaman kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan akan berkembang lebih kuat apabila pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi melibatkan praktik nyata yang melatih kemampuan mengambil keputusan dan mengelola ketidakpastian (Drucker, 2014:175). Pendidikan juga dapat memperkuat kreativitas dan inovasi mahasiswa melalui proyek, pelatihan, maupun kompetisi bisnis yang mendorong pembaruan usaha (Schumpeter, 2021:4). Pendidikan kewirausahaan, keterampilan, dan motivasi secara simultan terbukti berpengaruh terhadap peningkatan intensi kewirausahaan mahasiswa disertai inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan wirausahawan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis (Suratno et al., 2023:1737; Mulyany et al., 2023:208).

b) Dukungan Keluarga dan Jejaring Sosial

Dukungan keluarga dan jejaring sosial menjadi faktor eksternal penting karena dapat memperkuat motivasi, membangun keberanian, dan memberikan sumber daya awal seperti informasi, peluang, maupun bantuan moral. Lingkungan sosial yang mendukung membuat individu lebih percaya diri dalam mengambil risiko dan lebih kuat menghadapi kegagalan. Motivasi berprestasi juga cenderung berkembang ketika individu memperoleh dukungan sosial yang mendorong pencapaian (McClelland, 2016:259). Lingkungan sosial juga berperan membentuk pola adaptasi individu terhadap perubahan pasar dan kompetisi (Liu et al., 2022:3).

c) Akses terhadap Modal, Teknologi, dan Peluang Pasar

Ketersediaan modal, akses teknologi, dan peluang pasar sangat menentukan kemampuan individu untuk memulai dan mengembangkan usaha. Kondisi pasar yang berubah cepat juga menuntut adaptabilitas dan kemampuan membaca peluang. Adaptabilitas dipandang sebagai unsur penting kewirausahaan karena individu harus menyesuaikan strategi dan inovasi sesuai perubahan lingkungan usaha (Liu et al., 2022:7). Ketersediaan peluang juga menjadi faktor yang memungkinkan individu mempraktikkan inovasi secara nyata (Schumpeter, 2021:4).

d) Budaya Sosial dan Orientasi Keberlanjutan

Budaya masyarakat memengaruhi cara individu memandang kewirausahaan, termasuk toleransi terhadap kegagalan dan dukungan sosial terhadap wirausahawan muda. Budaya yang menghargai inovasi dan proses pembelajaran akan memperkuat keberanian mengambil risiko. Kewirausahaan modern juga semakin dipengaruhi tuntutan keberlanjutan sosial dan lingkungan, sehingga orientasi sosial menjadi dimensi penting dalam perkembangan jiwa kewirausahaan (Foucrier & Wiek, 2019:4). Perspektif Buddhis memperkuat aspek ini melalui ajaran tentang kepedulian terhadap kesejahteraan makhluk lain sebagai bagian dari tindakan yang benar (*Dh.185*).

Faktor internal membentuk kesiapan psikologis individu berupa motivasi, kreativitas, keberanian mengambil risiko, disiplin, resiliensi, serta kepercayaan diri. Faktor eksternal membentuk konteks sosial berupa dukungan pendidikan, keluarga, akses sumber daya, peluang pasar, serta budaya keberlanjutan. Interaksi keduanya menentukan kuat atau lemahnya jiwa kewirausahaan seseorang. Jiwa kewirausahaan berkembang optimal apabila faktor internal yang kuat didukung oleh

faktor eksternal yang kondusif. Pandangan ini sejalan dengan konsep kewirausahaan sebagai proses pembelajaran dan praktik yang dipengaruhi oleh dorongan personal serta pengalaman sosial yang membentuk perilaku usaha (Drucker, 2014:175; Liu et al., 2022:3; Foucrier & Wiek, 2019:4).

d. Kerangka konseptual jiwa kewirausahaan

Kerangka konseptual jiwa kewirausahaan merupakan struktur teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara komponen sikap, mentalitas, dan karakteristik yang membentuk diri seorang wirausahawan. Jiwa kewirausahaan dipahami sebagai konstruk multidimensional yang terdiri dari unsur motivasi, inovasi, keberanian menghadapi risiko, kemandirian, ketahanan mental, serta orientasi sosial.

Dorongan berprestasi menempati posisi penting sebagai sumber energi psikologis yang mendorong individu untuk bekerja keras, disiplin, dan berorientasi pada pencapaian tujuan usaha (McClelland, 2016:259). Dorongan ini memperkuat kepercayaan diri dan membentuk ketekunan dalam menghadapi hambatan. Komponen ini kemudian berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, karena inovasi merupakan inti kewirausahaan yang membedakan wirausahawan dari pekerja biasa (Schumpeter, 2021:4). Kreativitas dan inovasi membuat individu mampu menciptakan nilai tambah dalam produk atau strategi usaha. Kreativitas dan inovasi merupakan bagian dari kemampuan manajerial

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terbentuknya intensi kewirausahaan mahasiswa (Kurjono & Samlawi, 2023:1).

Komponen motivasi dan inovasi tidak akan berkembang secara optimal tanpa keberanian mengambil risiko. Jiwa kewirausahaan menuntut kemampuan menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan usaha yang diperhitungkan (Liu et al., 2022:3). Keberanian mengambil risiko juga memperkuat kemandirian karena individu harus mampu mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab terhadap hasilnya (Drucker, 2014:175).

Komponen resiliensi menjadi penopang agar jiwa kewirausahaan tidak berhenti pada tahap mencoba, tetapi mampu bertahan dalam jangka panjang. Resiliensi berperan sebagai daya tahan mental untuk menghadapi tekanan, kegagalan, serta perubahan pasar yang tidak menentu (Foucrier & Wiek, 2019:4). Resiliensi ini juga berhubungan dengan kemampuan individu menjaga semangat dan motivasi berprestasi dalam kondisi sulit.

Kerangka konseptual jiwa kewirausahaan modern semakin lengkap ketika memasukkan dimensi orientasi sosial. Kewirausahaan modern tidak hanya menekankan pencapaian ekonomi, tetapi juga menekankan keberlanjutan sosial dan lingkungan (Foucrier & Wiek, 2019:4). Perspektif Buddhis memperkuat dimensi ini melalui prinsip pengendalian diri, kesadaran, dan welas asih sehingga orientasi kewirausahaan tidak terjebak pada keserakahan, tetapi diarahkan pada

manfaat dan keseimbangan sosial (*Dh.178*). Keseimbangan ini melahirkan kewirausahaan yang lebih stabil, etis, dan berkelanjutan (*Dh.185*).

e. Indikator Jiwa Kewirausahaan

Indikator jiwa kewirausahaan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi enam indikator utama sebagai berikut:

1) Motivasi Berprestasi dan Kemandirian

Motivasi berprestasi merupakan dorongan internal untuk mencapai hasil yang lebih baik melalui usaha mandiri. Individu yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih tekun, lebih disiplin, serta lebih siap menghadapi tantangan usaha karena memiliki kebutuhan untuk mencapai keberhasilan. Dorongan ini sejalan dengan teori *need for achievement* yang menempatkan motivasi sebagai inti dari karakter kewirausahaan (McClelland, 2016:259). Motivasi yang stabil juga dapat diperkuat melalui orientasi moral Buddhis, karena pengendalian diri membantu individu menjaga fokus tanpa terjebak dalam keserakahan atau orientasi keuntungan semata (*Dh.1*).

2) Keberanian Mengambil Risiko

Keberanian mengambil risiko mencerminkan kesiapan individu menghadapi ketidakpastian dan berani mengambil keputusan usaha dengan perhitungan yang matang. Risiko dipandang sebagai bagian dari proses usaha yang harus dikelola secara rasional, bukan dihindari. Sikap ini menjadi unsur penting

dalam dinamika kewirausahaan modern karena lingkungan bisnis menuntut pengambilan keputusan yang cepat dan tepat (Makuya, 2024:4). Kemampuan ini selaras dengan prinsip kewaspadaan dan kebijaksanaan, karena keputusan usaha yang baik seharusnya tidak didorong oleh ketamakan atau impulsif, tetapi oleh pertimbangan yang jernih (*Dh.178*).

3) Kreativitas dan Inovasi

Kreativitas dan inovasi merupakan kemampuan menghasilkan ide baru, menciptakan produk atau layanan berbeda, serta memperbaiki proses usaha secara berkelanjutan. Inovasi menjadi inti dari kewirausahaan karena menjadi sumber utama penciptaan nilai dan keunggulan kompetitif. Pandangan ini menegaskan bahwa inovasi merupakan karakter utama yang membedakan wirausahawan dari pelaku ekonomi biasa (Schumpeter, 2021:4). Kreativitas juga dapat berkembang lebih stabil ketika individu memiliki pandangan jangka panjang dan tidak melekat pada hasil sesaat, karena ketidakkekalan menumbuhkan fleksibilitas berpikir dalam menghadapi perubahan (*S.V.11*).

4) Etos Kerja dan Konsistensi

Etos kerja mencerminkan semangat kerja keras, tanggung jawab, dan dedikasi untuk mencapai tujuan usaha. Konsistensi menunjukkan keteguhan individu dalam menjalankan rencana usaha meskipun menghadapi hambatan. Jiwa kewirausahaan tidak hanya

membutuhkan ide, tetapi juga ketekunan untuk merealisasikan ide tersebut melalui kerja nyata. Sikap ini sejalan dengan pandangan bahwa kewirausahaan dapat dipelajari melalui praktik kerja, disiplin, dan kemampuan mengelola ketidakpastian (Drucker, 2014:175). Ketekunan juga memperoleh landasan dalam Sigālovāda Sutta yang menekankan pentingnya kerajinan, kesungguhan, dan tidak larut dalam kemalasan dalam menjalankan kewajiban kehidupan (*D.III.184*). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa ketekunan dan konsistensi dalam bekerja merupakan bagian dari perilaku bertanggung jawab yang mendukung keberlangsungan usaha. Konsistensi juga didukung oleh pengendalian diri, karena individu yang mampu mengendalikan dorongan emosional lebih mudah menjaga stabilitas usaha dalam jangka panjang (*Dh.178*).

5) Adaptabilitas dan Resiliensi

Adaptabilitas merupakan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan usaha, sedangkan resiliensi mencerminkan ketahanan menghadapi tekanan dan kegagalan. Individu yang adaptif mampu membaca perubahan pasar dan menyesuaikan strategi, sedangkan individu yang resilien mampu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Kemampuan ini penting karena kewirausahaan modern bergerak dalam situasi yang tidak stabil dan penuh dinamika (Liu et al., 2022:3-7). Resiliensi juga sejalan dengan pemahaman Buddhis bahwa perubahan adalah

bagian alami kehidupan, sehingga individu perlu membangun ketahanan batin dan fleksibilitas menghadapi kondisi yang tidak pasti (*S.V.11*).

6) Orientasi Sosial

Orientasi sosial merupakan kemampuan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas usaha. Wirausahawan yang memiliki orientasi sosial tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga menekankan kebermanfaatan sosial dan keberlanjutan. Nilai ini memperkuat stabilitas usaha karena hubungan sosial yang sehat meningkatkan kepercayaan dan reputasi jangka panjang. Orientasi keberlanjutan dipandang sebagai bagian penting dalam pengembangan karakter kewirausahaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial (Foucrier & Wiek, 2019:4). Orientasi sosial juga sejalan dengan ajaran welas asih yang menekankan kepedulian terhadap makhluk lain sebagai fondasi tindakan yang benar (*Dh.185*).

2. Etika Wirausaha

a. Landasan Konseptual Etika Wirausaha

Etika wirausaha merupakan seperangkat prinsip moral yang membimbing individu dalam menjalankan aktivitas kewirausahaan agar tetap selaras dengan norma sosial, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab terhadap pihak lain. Etika wirausaha tidak hanya

berkaitan dengan penilaian benar atau salah dalam praktik bisnis, tetapi juga menyangkut kesadaran moral ketika mengambil keputusan, terutama saat wirausahawan berhadapan dengan dilema antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Caillier, 2016:883). Karena itu, etika menjadi dasar yang menjaga agar aktivitas usaha tidak merugikan pihak lain sekaligus tetap diterima secara sosial.

Perilaku etis antar wirausahawan tidak selalu sama. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif perkembangan moral (*moral development*) yang menekankan *moral reasoning* serta hubungan antara penilaian moral dan tindakan nyata. Perspektif ini menunjukkan bahwa mengetahui nilai moral tidak otomatis membuat seseorang konsisten bertindak sesuai nilai itu. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah *moral judgment* dengan *action gap*, yaitu ketika individu memahami apa yang benar, namun tindakan yang dilakukan tidak selalu sejalan dengan penilaian moralnya. Dalam kewirausahaan, gap ini sering menguat karena tekanan persaingan, kebutuhan menjaga arus kas, dan tuntutan pertumbuhan (DeTienne et al., 2021:430-431).

Urutan terjadinya keputusan etis dapat dijelaskan melalui model *ethical decision making*. Model ini menempatkan proses psikologis sebagai tahapan sebelum tindakan, yaitu mengenali adanya isu moral, melakukan penilaian moral, membentuk niat moral, lalu mewujudkannya dalam perilaku nyata. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa pelanggaran etika kadang terjadi bukan karena

individu tidak memahami etika, melainkan karena gagal mengenali isu moral, melakukan rasionalisasi, atau kehilangan komitmen ketika tekanan muncul pada tahap niat dan tindakan (Nguyen & Crossan, 2021:1).

Tekanan kompetisi dan keterbatasan sumber daya membuat dilema etis menjadi bagian yang sering muncul dalam kegiatan usaha. Pada situasi tertentu, pelaku usaha dapat membenarkan praktik yang menyimpang dari standar etis sebagai sesuatu yang dapat ditoleransi. Temuan kontemporer menunjukkan bahwa keputusan etis tidak hanya dipengaruhi penalaran rasional, melainkan juga dipengaruhi emosi, karakter, serta kebiasaan moral. Nilai seperti integritas dan tanggung jawab berperan menjaga agar penilaian moral tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi betul-betul tampak dalam perilaku bisnis (Nguyen & Crossan, 2021:1).

Aktivitas ekonomi selalu melibatkan relasi antar manusia. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga konsumen, pekerja, mitra, serta masyarakat. Oleh sebab itu, nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi unsur yang menentukan kualitas perilaku wirausahawan (De George, 2011:189). Tanpa pedoman moral yang jelas, kewirausahaan berpotensi bergeser menjadi praktik ekonomi yang merugikan atau eksploitatif.

Etika wirausaha dalam praktiknya berhubungan dengan profesionalitas. Profesionalitas menuntut pelaku usaha menjalankan

bisnis dengan standar perilaku yang transparan, adil, serta menghormati hak dan kewajiban pihak lain dalam transaksi maupun hubungan kerja (Bowie, 2017:41). Ukuran keberhasilan usaha dengan demikian tidak hanya dilihat dari capaian finansial, tetapi juga dari proses bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Etika wirausaha dalam operasional sering bertemu dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, CSR). Konsep CSR menegaskan bahwa bisnis memikul tanggung jawab ekonomi dan legal, serta mengandung tanggung jawab etis dan filantropis. Kerangka ini menempatkan dampak sosial dan lingkungan sebagai bagian dari pertimbangan usaha, sehingga keberlanjutan bisnis terkait langsung dengan praktik moral yang dijalankan. Kerangka CSR tersebut dirumuskan dalam *Pyramid of Corporate Social Responsibility* yang memposisikan tanggung jawab bisnis sebagai komitmen berlapis, mulai dari tanggung jawab ekonomi, kepatuhan legal, standar etis, hingga kontribusi filantropis. Struktur piramida ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh hasil finansial, tetapi juga oleh kualitas pemenuhan tanggung jawab moral dan sosial secara bertahap (Carroll, 2016: 39–41).

Etika juga berkaitan dengan reputasi dan daya saing. Praktik yang etis dapat membangun loyalitas pelanggan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan membentuk persepsi positif di masyarakat.

Kepercayaan publik menjadi aset yang menopang stabilitas usaha dan membantu bisnis bertahan dalam persaingan jangka panjang (Rode et al., 2015: 10345). Penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan nilai moral turut mendukung keberlanjutan usaha karena memperkuat hubungan sosial serta menurunkan risiko konflik eksternal (Pramesti & Rizal, 2022: 16005). Ketahanan dan keberlanjutan usaha juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam mengelola konflik dan beradaptasi terhadap perubahan (Purwanto et al., 2024:46).

Etika kewirausahaan tidak bersifat statis. Perilaku etis dapat terbentuk melalui struktur etis formal, seperti kebijakan organisasi dan sistem kontrol, serta struktur etis informal, seperti budaya kerja dan tekanan sosial dalam komunitas bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku etis tidak hanya dipengaruhi aturan eksternal, tetapi juga dipengaruhi karakter psikologis dan komitmen moral individu ketika menghadapi tekanan persaingan (Uriarte et al., 2025:323).

Berdasarkan uraian tersebut, etika wirausaha dapat dipahami sebagai prinsip moral yang membentuk perilaku dan keputusan bisnis, mencakup kejujuran, integritas, keadilan, profesionalitas, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini menjaga stabilitas relasi bisnis, memperkuat reputasi usaha, dan mendukung keberlanjutan kewirausahaan.

b. Etika Wirausaha dalam Perspektif Buddhis

Etika wirausaha dalam perspektif Buddhis dipahami sebagai praktik moral yang tidak hanya mengatur perilaku bisnis dalam ranah sosial, tetapi juga mencerminkan kualitas batin seseorang dalam bertindak, berbicara, dan mengambil keputusan. Aktivitas usaha dipandang sebagai bagian dari kehidupan duniawi yang sah untuk dijalankan, namun harus berada dalam koridor penghidupan benar (*sammā-ājīva*) agar tidak menjadi sumber penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Buddhisme menekankan bahwa kualitas kehidupan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan ekonomi, tetapi oleh keselarasan tindakan dengan jalan mulia berunsur delapan, khususnya tindakan benar, ucapan benar, dan penghidupan benar (*M.I.75*).

Penekanan utama Buddhisme terletak pada hubungan antara niat (*cetanā*) dan akibat perbuatan. Tindakan ekonomi tidak pernah dianggap netral, karena setiap tindakan selalu berakar pada kondisi batin. Pikiran yang dipenuhi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin cenderung menghasilkan tindakan merugikan, sedangkan pikiran yang diarahkan pada kebajikan menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan pihak lain (*Dh.1-2*). Oleh karena itu, etika wirausaha dalam Buddhisme bukan sekadar kepatuhan pada aturan eksternal, melainkan latihan batin untuk menjaga kemurnian niat dalam setiap aktivitas ekonomi.

Etika wirausaha dalam perspektif Buddhis dapat dipahami secara lebih sistematis yaitu dengan menjabarkannya ke dalam beberapa

dimensi utama yang menggambarkan bagaimana ajaran Buddhis membentuk pola pengambilan keputusan bisnis, relasi sosial-profesional, serta orientasi moral wirausahawan. Dimensi etika wirausaha dalam perspektif Buddhis meliputi enam aspek berikut.

1) Niat Benar (*Cetanā*) sebagai Dasar Moralitas Usaha

Buddhisme menegaskan bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh niat yang melandasinya. Tindakan yang tampak menguntungkan secara sosial dapat tetap dianggap tidak bermoral apabila dilakukan dengan niat manipulatif atau penuh keserakahan. Prinsip ini penting dalam kewirausahaan karena aktivitas bisnis sering melibatkan keputusan yang memiliki peluang untuk disalahgunakan, seperti menaikkan harga secara tidak wajar, mengurangi kualitas produk, atau memberikan informasi menyesatkan demi keuntungan. Niat yang benar menjadi fondasi agar keputusan usaha tidak didorong oleh kecenderungan merugikan pihak lain (*Dh.I-2*).

Niat benar juga membentuk stabilitas moral wirausahawan ketika menghadapi tekanan pasar. Persaingan sering mendorong pelaku usaha melakukan kompromi etika demi mempertahankan keuntungan. Namun, Buddhisme mengajarkan bahwa keputusan yang didasarkan pada niat salah akan melahirkan akibat yang tidak menguntungkan bagi pelaku maupun masyarakat. Atas dasar itu,

etika wirausaha Buddhis menempatkan kontrol niat sebagai langkah awal untuk menjaga usaha berada pada jalur moral.

2) Ucapan Benar (*Sammā-Vācā*) sebagai Prinsip Kejujuran Bisnis

Ucapan benar menekankan larangan terhadap kebohongan, fitnah, ucapan kasar, dan ucapan sia-sia. Dalam konteks kewirausahaan, ucapan benar berhubungan langsung dengan kejujuran dalam promosi, komunikasi bisnis, serta transparansi informasi produk. Banyak penyimpangan etika usaha muncul bukan dari tindakan fisik, melainkan dari komunikasi yang manipulatif, seperti klaim berlebihan, iklan menyesatkan, atau menyembunyikan risiko produk. Buddhisme memandang ketidakjujuran sebagai tindakan yang merusak hubungan sosial dan menimbulkan penderitaan bagi pihak lain (*M.I.75*).

Ucapan benar juga memiliki dampak strategis karena menjadi dasar kepercayaan pelanggan. Bisnis yang dijalankan dengan komunikasi jujur cenderung membangun reputasi yang stabil, sedangkan kebohongan meskipun menguntungkan dalam jangka pendek akan melemahkan legitimasi usaha dalam jangka panjang. Ajaran Buddha menekankan bahwa keburukan dapat dikalahkan dengan kebaikan, sehingga praktik kejujuran dan keterbukaan pada akhirnya memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi (*Dh.223*).

3) Penghidupan Benar (*Sammā-Ājīva*) sebagai Batas Moral Aktivitas Usaha

Penghidupan benar merupakan dimensi utama etika wirausaha dalam Buddhisme karena menjadi ukuran apakah suatu usaha dijalankan melalui cara yang benar atau justru menghasilkan penderitaan. Buddhisme menegaskan bahwa mencari nafkah merupakan kebutuhan wajar dalam kehidupan duniawi, tetapi cara memperoleh nafkah harus dilakukan tanpa menipu, menyakiti, atau merusak kehidupan makhluk lain (*M.I. 75*). Posisi ini menempatkan penghidupan benar sebagai pedoman untuk menilai apakah suatu jenis usaha dapat dibenarkan secara moral.

Kewirausahaan modern sering menciptakan peluang ekonomi yang berpotensi melanggar nilai kemanusiaan, misalnya eksploitasi tenaga kerja, produksi barang yang merusak kesehatan, atau praktik bisnis yang menimbulkan kerusakan sosial. Perspektif Buddhis menekankan bahwa keberhasilan ekonomi yang dicapai melalui cara salah tidak membawa kesejahteraan sejati, karena keuntungan tersebut dibangun di atas penderitaan pihak lain. Oleh karena itu, etika wirausaha Buddhis menempatkan jenis usaha dan cara usaha sebagai aspek fundamental dalam penilaian moral.

4) Pengendalian Diri dari Keserakahan (*Lobha*) dan Nafsu Keinginan (*Taṇhā*)

Keserakahan dan nafsu keinginan merupakan akar utama penderitaan dalam ajaran Buddha. Dunia bisnis sering mendorong pelaku usaha untuk mengejar profit tanpa batas, sehingga muncul kecenderungan menghalalkan segala cara. Buddhisme menekankan bahwa keterikatan terhadap keuntungan dapat menjadi sumber penderitaan karena melahirkan kecemasan, konflik sosial, dan tindakan tidak etis. Pengendalian diri ini dapat menjadi prinsip wirausahawan agar mampu menahan dorongan untuk mengambil keuntungan melalui cara yang merugikan pihak lain (*Dh.178*).

Pengendalian diri juga berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang lebih rasional. Pelaku usaha yang mampu mengendalikan dorongan emosional cenderung lebih bijaksana dalam mengelola risiko, mengatur keuangan, serta menentukan strategi bisnis. Etika wirausaha dalam perspektif Buddhis tidak hanya berkaitan dengan moralitas sosial, tetapi juga mencakup disiplin batin yang membentuk stabilitas psikologis wirausahawan. Prinsip ini mencegah bisnis berkembang menjadi aktivitas yang memicu ketegangan batin maupun tekanan sosial.

5) Welas Asih (*Karuṇā*) dan Tanggung Jawab terhadap Penderitaan Makhluk Lain

Welas asih (*karuṇā*) merupakan nilai dalam Buddhisme yang menekankan kepedulian terhadap penderitaan makhluk lain.

Dalam kewirausahaan, welas asih membentuk orientasi moral bahwa bisnis seharusnya tidak hanya menjadi sarana mencari keuntungan pribadi, tetapi juga menjadi sarana memberi manfaat bagi masyarakat. Aktivitas usaha yang tidak memperhatikan dampak sosial berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan, sedangkan usaha yang dijalankan dengan orientasi kebajikan dapat memperkuat kesejahteraan komunitas (*Dh.185*).

Welas asih juga tercermin dalam perlakuan adil terhadap pekerja, konsumen, dan mitra usaha. Praktik usaha yang etis tidak mengeksploitasi tenaga kerja, tidak memanipulasi pelanggan, serta tidak mengabaikan kesejahteraan sosial. Buddhisme menegaskan bahwa tindakan yang baik seharusnya melindungi dan menjaga makhluk lain sebagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya (*Dh.185*). Hal ini menunjukkan bahwa etika wirausaha Buddhis memperluas tanggung jawab bisnis dari sekadar kepatuhan hukum menjadi komitmen moral yang lebih mendalam.

6) Keseimbangan Relasi Sosial sebagai Etika Sosial dan Profesional

Etika wirausaha dalam Buddhisme juga menekankan relasi sosial yang harmonis. Kewirausahaan tidak dapat dipisahkan dari hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen, pekerja, mitra usaha, dan masyarakat. *Sigālovāda Sutta* menjelaskan bahwa hubungan sosial harus dijaga melalui keseimbangan hak dan kewajiban, penghormatan, serta tanggung

jawab yang dijalankan secara konsisten (*D.III.189*). Prinsip ini menunjukkan bahwa etika bisnis bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan tata hubungan sosial.

Keseimbangan relasi sosial-profesional diperlukan karena banyak konflik bisnis muncul dari ketimpangan perlakuan, ketidakadilan kontrak, atau ketidakjujuran dalam transaksi. Buddhisme menekankan bahwa keharmonisan sosial adalah syarat terciptanya kehidupan yang damai, sehingga wirausahawan yang etis harus mampu membangun relasi bisnis yang saling menghormati dan tidak merugikan pihak lain. Relasi sosial yang sehat juga membentuk stabilitas usaha karena memperkuat kepercayaan publik serta mengurangi potensi konflik dalam jangka panjang.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etika Wirausaha

Etika wirausaha tidak muncul secara otomatis, tetapi terbentuk melalui proses pembelajaran nilai yang panjang, baik dari pengalaman pribadi maupun pengaruh lingkungan sosial. Etika dalam kewirausahaan berkembang sebagai hasil interaksi antara prinsip moral individu dengan norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Etika juga terbentuk dari kebiasaan pengambilan keputusan yang berulang, sehingga wirausahawan tidak hanya membutuhkan pemahaman konseptual tentang moralitas, tetapi juga perlu membangun karakter yang mampu menjaga konsistensi

tindakan etis dalam praktik usaha (Caillier, 2016:883; Buchan, 2005:166).

Perkembangan etika wirausaha juga dipengaruhi oleh struktur etis formal dan informal dalam lingkungan bisnis. Struktur formal mencakup aturan organisasi, sistem kontrol, dan kebijakan perusahaan, sedangkan struktur informal mencakup budaya kerja, kebiasaan komunitas bisnis, dan tekanan sosial yang terbentuk dalam relasi usaha. Interaksi kedua struktur tersebut menentukan apakah seorang pelaku usaha terdorong untuk bertindak jujur dan adil, atau justru terdorong melakukan kompromi moral demi keuntungan sesaat (Uriarte et al., 2025:323).

Faktor-faktor yang mempengaruhi etika wirausaha dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut.

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang membentuk kecenderungan moral dan kemampuan mengambil keputusan etis dalam aktivitas kewirausahaan. Faktor ini mencerminkan kualitas karakter dan kesadaran moral seorang wirausahawan.

a) Kesadaran moral dan nilai pribadi

Kesadaran moral merupakan kemampuan individu membedakan tindakan yang benar dan salah berdasarkan

prinsip moral yang diyakini. Kesadaran moral membentuk sikap dasar dalam memandang usaha bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi sebagai aktivitas sosial yang harus dipertanggungjawabkan secara etis. Pemahaman nilai moral seperti integritas, kejujuran, dan keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun etika wirausaha (De George, 2011:189). Nilai moral yang kuat akan membimbing individu menolak praktik bisnis yang merugikan orang lain meskipun menguntungkan secara finansial.

b) Integritas pribadi dan komitmen etis

Integritas menjadi faktor internal karena menentukan konsistensi antara nilai yang diyakini dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam bisnis. Individu yang memiliki integritas cenderung lebih stabil dalam menghadapi dilema moral. Komitmen etis juga menunjukkan kesiapan individu menjadikan prinsip moral sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Etika kewirausahaan yang kuat tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan moral, tetapi oleh keteguhan untuk menjalankan nilai tersebut dalam situasi penuh tekanan (Caillier, 2016:883; Uriarte et al., 2025:323).

c) Profil psikologis dan kontrol diri

Karakter psikologis wirausahawan turut mempengaruhi cara individu memandang tanggung jawab moral. Individu yang mampu mengendalikan emosi, memiliki kesabaran, dan mampu berpikir jangka panjang cenderung lebih konsisten menjalankan keputusan etis. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa perkembangan etika kewirausahaan juga dipengaruhi oleh profil psikologis individu serta kecenderungan moral yang terbentuk dari pengalaman hidup (Uriarte et al., 2025:323). Kemampuan mengelola dorongan impulsif sangat diperlukan karena banyak pelanggaran etika bisnis muncul dari keputusan cepat yang didorong oleh tekanan keuntungan.

Dalam perspektif Buddhis, faktor internal ini berkaitan dengan kualitas batin. Ajaran Buddha menekankan bahwa pikiran merupakan dasar dari tindakan, sehingga perilaku yang benar hanya dapat muncul apabila batin dikendalikan dan diarahkan pada niat yang benar (*Dh.1-2*). Prinsip ini menegaskan bahwa etika wirausaha sangat dipengaruhi oleh kualitas mental individu, bukan sekadar aturan eksternal.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sosial, budaya, dan sistem ekonomi yang membentuk norma dan tekanan dalam aktivitas kewirausahaan. Faktor ini

menentukan sejauh mana individu dapat mempertahankan keputusan etis dalam praktik bisnis.

a) Norma sosial dan budaya masyarakat

Norma sosial membentuk standar perilaku yang dianggap wajar dalam aktivitas ekonomi. Budaya masyarakat yang menghargai kejujuran dan tanggung jawab sosial akan mendorong pelaku usaha menjalankan bisnis secara lebih etis. Sebaliknya, budaya yang permisif terhadap kecurangan dapat melemahkan komitmen moral individu. Etika kewirausahaan selalu berkaitan dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga penerimaan sosial terhadap praktik bisnis akan mempengaruhi tindakan wirausahawan (Caillier, 2016:883).

b) Lingkungan organisasi dan profesionalitas bisnis

Lingkungan organisasi juga menentukan perkembangan etika wirausaha. Budaya kerja yang menekankan profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas akan memperkuat praktik etika. Hal ini berkaitan dengan etika profesional yang menuntut standar perilaku adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam relasi usaha (Bowie, 2017:41). Dalam praktiknya, organisasi yang memiliki budaya etis akan membangun sistem kontrol yang memperkuat integritas pelaku usaha.

c) Sistem tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha

Tuntutan masyarakat modern tidak lagi hanya menilai usaha dari profit, tetapi juga dari tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan. Hal ini tercermin dalam *Pyramid of Corporate Social Responsibility* yang menempatkan tanggung jawab bisnis sebagai komitmen berlapis serta tuntutan CSR menjadi faktor eksternal yang mendorong wirausahawan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan (Carroll, 2016: 39–41).

d) Tekanan kompetisi dan ekspektasi pemangku kepentingan

Persaingan usaha yang ketat sering menciptakan tekanan untuk mencapai target keuntungan dengan cepat. Tekanan ini dapat mendorong sebagian pelaku usaha melakukan kompromi moral. Namun, dalam perspektif strategi bisnis modern, etika justru menjadi modal sosial untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Rode et al. (2015: 10345) menegaskan bahwa etika dapat menjadi strategi yang memperkuat loyalitas pelanggan, reputasi, serta daya saing jangka panjang. Karena itu, tuntutan pemangku kepentingan dapat menjadi faktor eksternal yang memperkuat perilaku etis jika wirausahawan memahami bahwa kepercayaan publik adalah aset utama usaha.

Faktor eksternal dalam perspektif Buddhis juga dapat dipahami melalui ajaran tentang relasi sosial yang seimbang. Sigālovāda Sutta menjelaskan bahwa hubungan sosial-profesional harus dibangun melalui keseimbangan hak dan kewajiban, kejujuran, penghormatan, serta tanggung jawab yang dijaga bersama (*D.III.189*). Prinsip ini menunjukkan bahwa etika wirausaha tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas batin individu, tetapi juga oleh sistem hubungan sosial yang mendukung perilaku benar.

Etika wirausaha dipengaruhi oleh faktor internal berupa kesadaran moral, integritas pribadi, komitmen etis, serta kontrol diri yang membentuk kualitas keputusan moral individu. Faktor eksternal berupa norma sosial, budaya organisasi, sistem CSR, serta tekanan kompetisi dan pemangku kepentingan membentuk konteks sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan praktik etika dalam bisnis. Interaksi kedua faktor tersebut menentukan sejauh mana etika wirausaha berkembang secara stabil dan konsisten dalam aktivitas kewirausahaan.

d. Kerangka Konseptual Etika Wirausaha

Kerangka konseptual etika wirausaha merupakan struktur teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara nilai moral individu, proses pengambilan keputusan bisnis, serta perilaku kewirausahaan yang etis. Etika wirausaha dipahami sebagai prinsip yang membentuk standar

tindakan wirausahawan agar sesuai dengan norma sosial, nilai profesional, serta tanggung jawab sosial yang diakui masyarakat (Caillier, 2016:883). Kerangka konseptual ini menempatkan etika sebagai elemen inti dalam kewirausahaan karena aktivitas usaha selalu berhubungan dengan kepentingan pihak lain.

Nilai moral utama seperti kejujuran, integritas, dan keadilan menjadi fondasi yang membentuk orientasi etika wirausahawan. Kejujuran membangun transparansi informasi kepada konsumen dan pemangku kepentingan, integritas mencerminkan konsistensi antara nilai moral dengan tindakan nyata, sedangkan keadilan menjadi dasar relasi bisnis yang tidak eksploitatif. Ketiga nilai tersebut membentuk karakter moral yang menentukan kualitas keputusan wirausahawan dalam menjalankan aktivitas usaha (Buchan, 2005:166; Purwanto et al., 2025:11).

Nilai moral tersebut kemudian terwujud melalui profesionalitas. Profesionalitas menuntut pelaku usaha menjalankan bisnis dengan akuntabilitas, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban pihak lain. Standar profesional ini memperkuat kualitas relasi usaha karena keputusan bisnis yang dijalankan secara adil dan transparan lebih mudah membangun kepercayaan jangka panjang (Bowie, 2017:41). Profesionalitas menjadi mekanisme yang menghubungkan nilai moral internal dengan praktik usaha nyata.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka konseptual etika wirausaha. Dalam kerangka konseptual etika wirausaha, CSR berfungsi sebagai jembatan antara orientasi profit dan kewajiban sosial-lingkungan. Mengacu pada Piramid CSR, tanggung jawab bisnis dipahami sebagai tanggung jawab berlapis yang relevan bagi keberlanjutan usaha (Carroll, 2016: 39–41).

Interaksi antara nilai moral, profesionalitas, serta tanggung jawab sosial tersebut membentuk reputasi usaha. Reputasi yang baik mendorong loyalitas pelanggan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan meningkatkan daya saing bisnis. Temuan penelitian menegaskan bahwa etika bukan hanya pedoman moral, tetapi juga strategi yang mendukung keberlanjutan usaha karena kepercayaan publik merupakan aset yang paling diperlukan dalam aktivitas kewirausahaan (Rode et al., 2015:10345; Pramesti & Rizal, 2022: 16005).

Perspektif Buddhis memperkuat kerangka konseptual etika wirausaha dengan menegaskan bahwa kualitas tindakan ditentukan oleh niat dan kondisi batin. Pikiran dan niat yang dilandasi keserakahan, kebencian, atau kegelapan batin akan melahirkan tindakan yang merugikan, sedangkan niat baik akan melahirkan tindakan yang membawa manfaat (*Dh.1-2*). Prinsip kejujuran juga dipertegas melalui ajaran bahwa keburukan dapat dikalahkan dengan kebaikan dan

ketidakjujuran pada akhirnya akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi pelakunya (*Dh.223*). Relasi sosial-profesional juga harus dijaga melalui keseimbangan hak dan kewajiban agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi (*D.III.189*).

Kerangka konseptual etika wirausaha dalam penelitian ini dipahami sebagai struktur nilai moral yang membentuk perilaku bisnis melalui kejujuran, integritas, keadilan, profesionalitas, tanggung jawab sosial-lingkungan, serta komitmen etis dalam pengambilan keputusan. Struktur ini menjelaskan bahwa etika berperan membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan memperkuat keberlanjutan usaha.

Etika wirausaha dalam perspektif Buddhis dengan demikian dipahami sebagai praktik moral yang berakar pada niat benar, ucapan benar, penghidupan benar, pengendalian diri dari keserakahan, welas asih, serta keseimbangan relasi sosial. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa kewirausahaan yang benar bukan hanya mengejar profit, tetapi juga membangun kesejahteraan bersama melalui keputusan yang jujur, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan penderitaan. Etika wirausaha Buddhis menjadi kerangka moral yang relevan bagi kewirausahaan modern karena mampu menjaga stabilitas usaha tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial.

e. Indikator Etika Wirausaha

Indikator etika wirausaha dalam penelitian ini dirumuskan untuk menggambarkan unsur-unsur moral yang menjadi dasar perilaku seorang wirausahawan dalam menjalankan usaha. Etika wirausaha tidak hanya dipahami sebagai nilai normatif, tetapi juga sebagai prinsip yang membentuk pola pengambilan keputusan bisnis dan relasi sosial dalam dunia usaha (Caillier, 2016:883). Praktik bisnis yang dijalankan tanpa etika berpotensi menimbulkan penyimpangan moral seperti manipulasi, eksploitasi, serta pelanggaran kepercayaan publik, sehingga keberlanjutan usaha menjadi sulit tercapai (De George, 2011:189).

Nilai-nilai etika wirausaha berhubungan erat dengan reputasi dan keberhasilan bisnis. Penerapan etika dapat memperkuat loyalitas pelanggan, membangun citra positif, serta meningkatkan daya saing jangka panjang (Rode et al., 2015: 10345). Sejalan dengan itu, kualitas layanan dan citra yang baik juga terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan serta mendorong niat untuk merekomendasikan suatu lembaga atau usaha kepada pihak lain (Pramesti & Rizal, 2022: 160133). Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran merek dan persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan jasa dan loyalitas konsumen, sehingga semakin menegaskan pentingnya praktik usaha yang bermutu, dipercaya, dan bernilai dalam memperkuat posisi bersaing suatu bisnis (Febrianus, 2025:1297).

Etika wirausaha dalam penelitian ini disusun menjadi enam indikator utama sebagai berikut.

1) Kejujuran dan Transparansi

Kejujuran merupakan indikator utama dalam etika wirausaha karena menjadi fondasi kepercayaan dalam relasi bisnis. Wirausahawan yang jujur akan menyampaikan informasi produk, harga, maupun kualitas barang secara benar kepada konsumen. Kejujuran juga berkaitan dengan keterbukaan dalam laporan keuangan, proses pengambilan keputusan, serta komunikasi kepada pemangku kepentingan.

Bisnis yang dijalankan dengan kejujuran dan transparansi lebih mudah memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan serta membangun reputasi positif. Unsur ini menjadi dasar dalam praktik kewirausahaan modern yang menuntut akuntabilitas tinggi (Buchan, 2005:166; Uriarte et al., 2025:323). Nilai tersebut juga selaras dengan ajaran Buddhis bahwa ketidakjujuran pada akhirnya akan terungkap, sehingga seseorang perlu menegakkan kebenaran dalam ucapan maupun tindakan (*Dh.223*). Prinsip ini memperlihatkan bahwa kejujuran bukan sekadar strategi bisnis, tetapi juga latihan moral yang menentukan kualitas perilaku usaha.

2) Integritas Moral

Integritas merupakan keselarasan antara nilai moral yang diyakini dengan tindakan nyata dalam menjalankan usaha.

Wirausahawan yang memiliki integritas tidak mudah tergoda untuk mengambil keuntungan melalui cara yang tidak etis, sekalipun hal tersebut tampak menguntungkan dalam jangka pendek. Integritas juga mencerminkan keberanian moral untuk menolak praktik yang melanggar norma sosial maupun profesional.

Integritas menentukan konsistensi perilaku pelaku usaha dalam menghadapi tekanan pasar, persaingan, maupun dilema etis. Nilai integritas juga menegaskan bahwa keputusan bisnis seharusnya tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi tetap mempertimbangkan standar moral (Caillier, 2016:884; Buchan, 2005:166). Dalam konteks Buddhis, integritas dipahami sebagai bentuk keteguhan menjaga kebenaran dan niat yang benar, karena kualitas tindakan dipengaruhi oleh kondisi batin dan pikiran yang melandasinya (*Dh.1-2*).

3) Keadilan dalam Relasi Bisnis

Keadilan dalam etika wirausaha berarti memperlakukan semua pihak secara setara, baik konsumen, karyawan, maupun mitra usaha. Keadilan mencakup sikap tidak diskriminatif, tidak merugikan pihak tertentu, serta tidak mengambil keuntungan melalui eksploitasi. Nilai keadilan juga berhubungan dengan penghormatan terhadap hak dan kewajiban dalam relasi ekonomi.

Keadilan diperlukan karena relasi bisnis yang tidak adil akan menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik.

Praktik usaha yang adil membentuk stabilitas hubungan sosial yang mendukung keberlanjutan usaha. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari nilai moral seperti keadilan dan tanggung jawab sosial (De George, 2011:189). Dalam ajaran Buddhis, hubungan sosial-profesional harus dijalankan dengan keseimbangan kewajiban dan penghormatan agar tercipta keharmonisan sosial (*D.III.189*).

4) Profesionalitas

Etika profesional mengacu pada kemampuan pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis sesuai standar profesi yang adil, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Profesionalitas tidak hanya terlihat dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap menghormati aturan, menjaga kualitas layanan, serta mempertahankan praktik bisnis yang transparan.

Dunia usaha menuntut pelaku bisnis memiliki kredibilitas agar dapat membangun kepercayaan jangka panjang, sehingga dengan adanya praktik bisnis yang profesional memperkuat hubungan dengan pelanggan, mitra usaha, dan lembaga sosial lainnya. Etika profesional juga memperjelas bahwa kewirausahaan bukan hanya aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dalam relasi kerja (Bowie, 2017:41). Perspektif ini mendukung pemahaman bahwa moralitas harus

melekat dalam sistem bisnis modern agar tidak merusak struktur sosial.

5) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan indikator etika wirausaha yang menekankan bahwa bisnis memiliki kewajiban terhadap masyarakat serta lingkungan tempat usaha beroperasi. Pelaku usaha perlu mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan bisnis, seperti kesejahteraan pekerja, kontribusi bagi komunitas, serta kepedulian terhadap isu lingkungan dan tidak berhenti pada kepatuhan minimum, melainkan membangun komitmen sosial yang berkesinambungan. Kerangka Piramid CSR memperlihatkan bahwa tanggung jawab bisnis bersifat bertingkat dan saling melengkapi, sehingga praktik etis tidak dapat dilepaskan dari kepedulian sosial dan lingkungan (Carroll, 2016: 39–41). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kualitas layanan, citra, dan persepsi kualitas berkontribusi pada penilaian positif terhadap suatu usaha (Pramesti & Rizal, 2022: 16013; Febrianus, 2025:1297). Perspektif Buddhis memperkuat nilai ini melalui ajaran welas asih yang menekankan kepedulian terhadap penderitaan makhluk lain sebagai bagian dari tindakan yang benar (*Dh.185*).

6) Komitmen Etis dalam Pengambilan Keputusan

Komitmen etis merupakan kesediaan pelaku usaha untuk selalu mempertahankan nilai moral dalam setiap keputusan bisnis, terutama dalam situasi yang penuh tekanan, kompetisi, atau dilema moral. Komitmen ini menjadi penentu apakah seorang wirausahawan akan konsisten menjalankan prinsip etika atau justru berkompromi demi keuntungan sesaat.

Komitmen etis dipengaruhi oleh struktur etis formal maupun informal dalam lingkungan usaha, seperti aturan organisasi, budaya bisnis, serta tekanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa etika wirausaha berkembang secara dinamis dan dipengaruhi sistem sosial yang membentuk perilaku individu (Uriarte et al., 2025:323). Komitmen etis juga dipahami sebagai strategi yang memperkuat loyalitas pelanggan dan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga memberikan dampak positif terhadap daya saing jangka panjang (Rode et al., 2015: 10345). Dalam konteks pendidikan kewirausahaan, komitmen etis dapat membentuk mahasiswa agar mampu mengambil keputusan usaha secara bijaksana, bertanggung jawab, dan stabil menghadapi risiko (Caillier, 2016:884; Rode et al., 2015: 10349).

3. Perilaku Kepemimpinan Buddhis

a. Landasan Konseptual Perilaku Kepemimpinan Buddhis

Perilaku kepemimpinan Buddhis dipahami sebagai pola tindakan dan pengambilan keputusan yang bertumpu pada kualitas batin serta

komitmen moral sebagaimana diajarkan dalam Dhamma. Kepemimpinan tidak diletakkan pada kemampuan menguasai kekuasaan, melainkan pada tanggung jawab menjaga kesejahteraan bersama dan keteraturan sosial. Ajaran Buddha menegaskan bahwa tindakan berawal dari pikiran; kondisi batin menentukan arah akibat yang muncul (*Dh.1-2*). Pemimpin yang batinnya jernih akan melahirkan kebijakan yang membawa manfaat, sedangkan batin yang dikuasai keserakahan dan kebencian menghasilkan penderitaan sosial.

Cakkavatti-Sīhanāda Sutta (*D.III.61*) ditempatkan sebagai landasan utama dalam memahami perilaku kepemimpinan Buddhis. Sutta tersebut menggambarkan kepemimpinan ideal melalui kewajiban seorang pemimpin untuk menjadikan Dhamma sebagai dasar tindakan, memberikan perlindungan secara adil, mencegah ketidakadilan, memperhatikan kesejahteraan pihak yang membutuhkan, serta mempertimbangkan nasihat dari individu yang memiliki kualitas moral dan kebijaksanaan (*D.III.61*). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Buddhis tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kewenangan, tetapi terutama dengan tanggung jawab moral, keadilan, kebijaksanaan, dan orientasi pada kesejahteraan bersama. Ketika prinsip tersebut diabaikan, kemiskinan dan ketidakadilan dapat berkembang menjadi kemerosotan moral dan sosial (*D.III.65-71*). *Cakkavatti-Sīhanāda Sutta* memberikan kerangka

normatif yang menghubungkan kualitas moral pemimpin dengan perilaku nyata dan konsekuensi sosial dari kepemimpinannya.

Pandangan ini memiliki kesesuaian dengan teori kepemimpinan modern yang menempatkan moralitas sebagai inti kepemimpinan autentik. Kepemimpinan transformasional menekankan bahwa kepemimpinan sejati berakar pada kesadaran moral dan pengangkatan nilai-nilai pengikut ke tingkat yang lebih tinggi, bukan sekadar pada posisi atau kekuasaan formal namun juga pada kinerja usaha melalui peningkatan kemampuan adaptasi dan inovasi (Reid & Dold, 2018:95; Sunarso et al., 2025:263). Model kepemimpinan spiritual menunjukkan bahwa altruisme, integritas, dan makna transenden menjadi fondasi budaya organisasi yang berkelanjutan (Fry, 2003:695). Temuan empiris juga menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis nilai Buddhis mendorong solidaritas sosial serta keberlanjutan ekologis (Xu et al., 2022:1201) dan memperkuat budaya organisasi yang etis serta berorientasi jangka panjang (Burton & Vu, 2021:442).

Tiga prinsip dalam kepemimpinan Buddhis kontemporer meliputi belas kasih (*karuṇā*), kebijaksanaan (*paññā*), dan pelayanan tanpa pamrih (*sēvā*), yang membentuk orientasi kepemimpinan berpusat pada kesejahteraan kolektif dan tanggung jawab sosial (Vallabh & Singhal, 2014:770). Ketiga prinsip tersebut tidak berdiri sebagai konsep abstrak, melainkan terwujud dalam sikap dan keputusan konkret yang memengaruhi tata kelola sosial.

Belas kasih atau *karuṇā* mengarahkan pemimpin untuk peka terhadap penderitaan dan kebutuhan pihak lain. Orientasi ini mendorong pengambilan kebijakan yang melindungi kelompok rentan serta mencegah munculnya ketimpangan sosial. *Cakkavatti Sihanāda Sutta* menegaskan bahwa pemimpin yang tidak memenuhi kebutuhan dasar rakyat akan memicu berkembangnya kemiskinan yang kemudian menimbulkan pencurian, kekerasan, dan kemerosotan moral masyarakat secara bertahap (*D.III.65-71*). Kepedulian sosial dengan demikian menjadi prinsip tata kelola yang berdampak struktural terhadap keberlanjutan masyarakat.

Kebijaksanaan atau *paññā* merujuk pada kemampuan memahami hubungan sebab akibat secara jernih serta mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap kebijakan. Pemimpin yang bijaksana tidak bertindak berdasarkan dorongan emosional atau kepentingan sesaat, tetapi menjadikan Dhamma sebagai rujukan dalam menentukan arah tindakan (*D.III.61*). Kebijakan juga menuntut pengendalian diri dan kestabilan batin agar keputusan tidak dikuasai oleh kemarahan atau kebencian (*Dh.291*). *Paññā* menjaga agar kepemimpinan tetap rasional, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Pelayanan tanpa pamrih atau *sēvā* menempatkan kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian. Jabatan tidak dipandang sebagai sarana akumulasi keuntungan pribadi, melainkan sebagai amanah untuk

melindungi dan menyejahterakan pihak lain (*D.III.61*). Orientasi ini menuntut sikap batin yang tidak melekat pada kepentingan diri, sebab keterikatan pada ambisi pribadi akan mengaburkan tujuan pelayanan.

Kesederhanaan hidup menjadi ekspresi etis dari ketiga prinsip tersebut. Kepemimpinan ideal ditandai oleh kesederhanaan, welas asih, dan pengabdian tulus demi kepentingan orang banyak (Dalai Lama, 2001:123). Kesederhanaan mencerminkan kebebasan dari ketamakan dan keterikatan pada materi (*D.II.2*). Kebahagiaan sejati tidak bersumber dari kemewahan atau akumulasi kekayaan, melainkan dari kehidupan yang selaras dengan kebenaran (*Dh.32*). Sikap ini menjaga agar kekuasaan tidak berubah menjadi sarana pemuasan diri, tetapi tetap terarah pada kesejahteraan bersama.

Prinsip kepemimpinan yang terdapat dalam *Cakkavatti-Sīhanāda Sutta* (*D.III.61*) tersebut diperkaya melalui Dasa Raja Dhamma, yaitu sepuluh kebajikan kepemimpinan yang tercantum dalam *Mahāhaṃsa Jātaka*. Sepuluh kebajikan tersebut meliputi *dāna*, *sīla*, *pariccāga*, *ājjava*, *maddava*, *tapa*, *akkodha*, *avihiṃsā*, *khanti*, dan *avirodhana* (*J.V.378*). Dasa Raja Dhamma memberikan uraian mengenai kualitas moral yang perlu diwujudkan dalam perilaku seorang pemimpin. Sepuluh kebajikan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kedermawanan (*dāna*)

Kedermawanan berarti kesediaan menggunakan sumber daya untuk kesejahteraan bersama dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi (*D.III.65-66*).

2) Moralitas (*sīla*)

Moralitas menuntut konsistensi pada prinsip benar-salah yang melindungi pihak lain dari kerugian. Karena tindakan berakar pada pikiran (*Dh.1-2*), kebijakan yang tidak bermoral akan membawa dampak sosial yang merusak.

3) Pengorbanan Diri (*pariccāga*)

Pengorbanan diri menunjukkan kesediaan mendahulukan kepentingan kolektif dibanding kepentingan pribadi, mencerminkan kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian (Dalai Lama, 2001:123).

4) Kejujuran (*ājjava*)

Kejujuran membangun kepercayaan sebagai dasar legitimasi sosial. Keteladanan dalam integritas menjadi sumber penghormatan masyarakat (*It.122; A.IV.16*).

5) Kelembutan (*maddava*)

Kelembutan mengandung cara memimpin yang tegas tanpa menindas, menjaga agar otoritas tidak berubah menjadi kekerasan psikologis.

6) Pengendalian Diri (*tapa*)

Pengendalian diri menjaga pemimpin dari dorongan ego dan ketamakan. Sikap bebas dari keserakahan menjadi syarat kestabilan batin (*D.III.2*). Kemampuan mengendalikan kemarahan dan kebencian juga ditekankan dalam Dhammapada (*Dh.291*).

7) Tidak Mudah Marah (*akkodha*)

Pemimpin yang tidak dikuasai kemarahan mampu menjaga kejernihan keputusan dan mencegah lahirnya penderitaan baru (*Dh.291*).

8) Tanpa Kekerasan (*avihiṃsā*)

Tanpa kekerasan berarti tidak menyakiti secara fisik, verbal, maupun struktural. Ketidakadilan sosial digambarkan sebagai pemicu kekerasan yang meluas ketika kepemimpinan gagal menjaga kesejahteraan rakyat (*D.III.65-71*).

9) Kesabaran (*khanti*)

Kesabaran memungkinkan pemimpin tetap stabil dalam proses perubahan jangka panjang dan menjaga harmoni ketika menghadapi tekanan (*Dh.291*).

10) Keteguhan dalam Kebenaran (*avirodhana*)

Keteguhan dalam kebenaran menuntut konsistensi pada prinsip Dhamma walaupun menghadapi tekanan kepentingan. Keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan ditegaskan

sebagai bentuk integritas (*M.I.10*). Kepemimpinan yang adil dan tidak pilih kasih menjaga kepercayaan masyarakat (*D.I.135*).

Kesepuluh kebajikan tersebut memperluas prinsip *karuṇā*, *paññā*, dan *sēvā* ke dalam perilaku konkret. Integrasi ajaran Tipiṭaka, teori kepemimpinan modern, dan temuan empiris menunjukkan bahwa kepemimpinan Buddhis berakar pada kualitas batin, diwujudkan dalam kebijakan bermoral, dan relevan dalam tata kelola organisasi masa kini.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepemimpinan Buddhis

Perilaku kepemimpinan Buddhis terbentuk melalui proses pembinaan batin dan interaksi sosial yang berkelanjutan. Pola kepemimpinan yang berakar pada Dhamma tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan institusional tempat individu menjalankan perannya. Kepemimpinan yang bermoral lahir dari integrasi antara kematangan batin dan konteks eksternal yang mendukung aktualisasi nilai.

1) Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada kualitas batin, kematangan moral, serta orientasi nilai yang tertanam dalam diri individu. Ajaran Buddha menegaskan bahwa pikiran mendahului setiap tindakan dan kualitas batin menentukan arah akibat yang muncul (*Dh.1-2*). Kepemimpinan yang bermoral mensyaratkan kejernihan batin agar kebijakan yang diambil tidak didorong oleh keserakahan, kebencian, atau delusi.

Integritas moral atau *sīla* menjadi fondasi utama perilaku kepemimpinan. Moralitas membentuk keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan komitmen etis yang konsisten (*M.I.10*). Kepercayaan masyarakat tumbuh ketika pemimpin menunjukkan keteladanan moral dan konsistensi dalam bertindak (*It.122*). Legitimasi sosial juga diperkuat melalui integritas yang terjaga dalam setiap kebijakan (*A.IV.16*). Tanpa landasan moral yang kokoh, otoritas struktural mudah bergeser menjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Kebijaksanaan atau *pañña* juga merupakan faktor internal yang menentukan kualitas kepemimpinan. Kebijakan mengarahkan pemimpin untuk memahami hubungan sebab akibat serta mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan. Kemampuan ini menuntut pengendalian diri dan stabilitas emosi agar tindakan tidak bersifat impulsif (*Dh.291*). Kepemimpinan yang berakar pada kebijaksanaan terbukti berkaitan dengan orientasi keberlanjutan dan solidaritas sosial dalam konteks organisasi modern (Xu et al., 2022:1201).

Orientasi pelayanan dan welas asih menjadi faktor internal berikutnya. Prinsip *karuṇā* dan *sēvā* menempatkan kepemimpinan sebagai pengabdian demi kesejahteraan bersama, bukan sebagai sarana akumulasi kepentingan pribadi (Vallabh & Singhal,

2014:770). Nilai pengorbanan diri dan tanggung jawab sosial yang tercermin dalam Dasa Raja Dhamma menunjukkan bahwa pemimpin berkewajiban memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi (*D.III.61*). Kegagalan memenuhi tanggung jawab tersebut berimplikasi pada berkembangnya kemiskinan, kejahatan, dan kemerosotan moral sosial secara bertahap (*D.III.65-71*). Faktor internal yang matang akan mendorong pemimpin mengantisipasi dampak tersebut melalui kebijakan yang adil dan berorientasi kesejahteraan.

Kematangan batin, integritas moral, kebijaksanaan reflektif, pengendalian diri, serta orientasi pelayanan merupakan inti faktor internal yang membentuk perilaku kepemimpinan Buddhis.

2) Faktor Eksternal

Perilaku kepemimpinan Buddhis juga dipengaruhi oleh konteks eksternal yang membingkai tindakan individu. Lingkungan sosial dan institusional menyediakan ruang aktualisasi nilai serta membentuk standar perilaku yang diterima dalam suatu komunitas.

Budaya organisasi menjadi faktor eksternal yang signifikan. Organisasi yang menekankan altruisme, integritas, dan makna spiritual dalam tata kelola akan memperkuat pola kepemimpinan yang etis dan berorientasi jangka panjang (Fry, 2003:695). Implementasi nilai Buddhis dalam organisasi modern terbukti membangun budaya kepemimpinan yang berkelanjutan dan

bertanggung jawab (Burton & Vu, 2021:442). Dalam konteks pendidikan tinggi berbasis Buddhis, kurikulum, keteladanan dosen, serta praktik akademik yang menekankan tanggung jawab moral turut membentuk standar kepemimpinan yang diinternalisasi mahasiswa (Herman, 2024:36).

Struktur sosial yang menuntut akuntabilitas dan keadilan juga memengaruhi perilaku kepemimpinan. Ketika lingkungan sosial mengedepankan transparansi dan keseimbangan hak serta kewajiban, pemimpin terdorong untuk bertindak sesuai prinsip Dhamma (*D.III.65-71*). Relasi sosial yang dilandasi kejujuran dan tanggung jawab menciptakan stabilitas serta memperkuat legitimasi kepemimpinan.

Dinamika perubahan sosial dan tuntutan keberlanjutan global turut memengaruhi bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan berbasis nilai Buddhis menunjukkan relevansi dalam menghadapi tantangan ekologis dan sosial karena berorientasi pada solidaritas serta tanggung jawab jangka panjang (Xu et al., 2022:1201). Konteks eksternal yang kompleks mendorong aktualisasi kebijaksanaan dan welas asih dalam pengambilan keputusan organisasi.

Interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal menentukan kualitas akhir perilaku kepemimpinan Buddhis. Kematangan batin menyediakan arah moral dan kesadaran reflektif,

sedangkan lingkungan sosial dan institusional menyediakan ruang aktualisasi nilai dalam tindakan nyata. Kepemimpinan Buddhis berkembang optimal ketika integritas pribadi bertemu dengan budaya organisasi yang mendukung pelayanan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial.

c. Kerangka Konseptual Perilaku Kepemimpinan Buddhis

Perilaku kepemimpinan Buddhis dalam penelitian ini dipahami sebagai hasil dari proses internalisasi nilai yang bertransformasi menjadi pola tindakan nyata dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Kerangka konseptualnya tidak berhenti pada penjelasan prinsip moral, melainkan menjelaskan bagaimana kualitas batin membentuk orientasi tindakan, kemudian termanifestasi dalam perilaku kepemimpinan yang dapat diamati.

Ajaran Buddha menegaskan bahwa pikiran menjadi dasar lahirnya perbuatan (*Dh. I-2*). Pernyataan ini menjadi fondasi konseptual bahwa kualitas batin berfungsi sebagai sumber internal yang mengarahkan tindakan eksternal. Dalam konteks kepemimpinan, kualitas seperti moralitas, kebijaksanaan, dan welas asih tidak berdiri sebagai nilai abstrak, tetapi menjadi struktur psikologis yang memengaruhi cara individu menilai situasi, menginterpretasi risiko, serta menentukan respons terhadap tekanan.

Kerangka konseptual ini dapat dipahami melalui tiga tahapan utama.

- 1) Tahap pertama adalah internalisasi nilai. Pada tahap ini, individu menghayati prinsip moral seperti integritas, pengendalian diri, dan tanggung jawab sebagai bagian dari komitmen pribadi (*M.I.10*). Nilai tidak lagi dipahami sebagai aturan eksternal, tetapi sebagai kesadaran reflektif yang membentuk standar internal perilaku. Ketika moralitas telah terinternalisasi, pemimpin memiliki batas etis yang stabil dalam menghadapi berbagai situasi.
- 2) Tahap kedua adalah pembentukan orientasi kepemimpinan. Internalisasi nilai melahirkan orientasi batin tertentu, seperti orientasi pelayanan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Orientasi ini membentuk cara pemimpin memandang kekuasaan sebagai amanah dan tanggung jawab sosial (*D.III.61*). Kebijakan atau *paññā* memungkinkan individu memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang diambil, sehingga tindakan tidak didorong oleh kepentingan sesaat (*Dh.291*). Pada tahap ini, kualitas batin membentuk kerangka berpikir dan cara menilai kebijakan.
- 3) Tahap ketiga adalah manifestasi dalam perilaku nyata. Orientasi yang telah terbentuk tercermin dalam keputusan yang adil, sikap tidak diskriminatif, pengendalian emosi, serta kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kegagalan memenuhi tanggung jawab kepemimpinan berimplikasi pada ketidakseimbangan sosial dan kemerosotan moral masyarakat

(D.III.65-71). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan memiliki dampak struktural, bukan sekadar dampak individual.

Pola ini sejalan dengan model kepemimpinan transformasional dan spiritual yang menempatkan moralitas, makna, dan altruisme sebagai fondasi perilaku pemimpin serta memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif dalam organisasi pendidikan (Reid & Dold, 2018:95; Fry, 2003:695; Suryadi et al., 2024:25). Temuan empiris menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis nilai Buddhis berkaitan dengan solidaritas sosial dan orientasi keberlanjutan dalam organisasi (Xu et al., 2022:1201; Burton & Vu, 2021:442). Kesesuaian ini memperkuat posisi konseptual bahwa perilaku kepemimpinan Buddhis merupakan integrasi antara kualitas batin dan orientasi kebijakan yang terwujud dalam tindakan konkret.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual perilaku kepemimpinan Buddhis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: kualitas batin yang mencakup moralitas, kebijaksanaan, dan welas asih membentuk orientasi kepemimpinan yang berpusat pada pelayanan dan tanggung jawab sosial; orientasi tersebut selanjutnya terwujud dalam perilaku nyata berupa integritas, keadilan, pengendalian diri, dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Struktur ini menempatkan perilaku kepemimpinan sebagai hasil integrasi antara dimensi internal dan aktualisasi eksternal nilai.

d. Indikator Perilaku Kepemimpinan Buddhis

Perilaku kepemimpinan Buddhis sebagai variabel penelitian memerlukan indikator operasional yang merepresentasikan kualitas batin dan kebajikan kepemimpinan sebagaimana dirumuskan dalam ajaran Dhamma serta didukung kajian kepemimpinan kontemporer. Indikator dirumuskan secara ringkas dan representatif agar mencerminkan prinsip *karuṇā*, *paññā*, *sēvā*, serta nilai-nilai Dasa Raja Dhamma tanpa memperluasnya menjadi terlalu fragmentatif.

Enam indikator dalam penelitian ini merupakan hasil sintesis beberapa landasan konseptual kepemimpinan Buddhis. Dasa Raja Dhamma menjadi salah satu sumber nilai yang dipadukan dengan prinsip *karuṇā*, *paññā*, *sēvā*, ajaran kepemimpinan dalam *Cakkavatti-Sihanāda Sutta*, serta kajian kepemimpinan kontemporer. Beberapa unsur Dasa Raja Dhamma yang memiliki kedekatan makna direpresentasikan secara terpadu dalam indikator operasional yang lebih luas. Perilaku kepemimpinan Buddhis dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam enam indikator utama sebagai berikut.

1) Integritas Moral

Integritas moral merujuk pada konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang selaras dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Moralitas menjadi fondasi legitimasi kepemimpinan karena tindakan berakar pada kondisi batin (*Dh.I-2*). Keselarasan antara niat dan tindakan ditegaskan sebagai bentuk integritas dalam praktik kehidupan bermoral (*M.I.10*). Keteladanan moral

memperkuat kepercayaan sosial dan penghormatan terhadap pemimpin (*It.122; A.IV.16*).

Indikator ini merepresentasikan unsur moralitas (*sīla*), kejujuran (*ājjava*), dan keteguhan dalam kebenaran (*avirodhana*) dalam Dasa Raja Dhamma, karena ketiganya menekankan konsistensi moral, kejujuran, serta keselarasan antara prinsip dan tindakan seorang pemimpin.

2) Kebijaksanaan dalam Pengambilan Keputusan

Kebijaksanaan merujuk pada kemampuan memahami hubungan sebab akibat serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan. Kejernihan batin menjaga pemimpin dari keputusan yang dipengaruhi kemarahan atau dorongan emosional (*Dh.291*). *Paññā* menjadi unsur sentral dalam kepemimpinan Buddhis karena mengarahkan tindakan pada keseimbangan dan keberlanjutan sosial (Vallabh & Singhal, 2014:770). Temuan empiris menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis nilai Buddhis berkaitan dengan orientasi keberlanjutan dan solidaritas sosial (Xu et al., 2022:1201).

Indikator ini terutama merepresentasikan *paññā* sebagai kualitas kebijaksanaan dalam kepemimpinan Buddhis. Meskipun *paññā* tidak tercantum sebagai unsur tersendiri dalam Dasa Raja Dhamma, kebijaksanaan menjadi dasar dalam menerapkan keteguhan pada kebenaran (*avirodhana*) secara tepat melalui

keputusan yang selaras dengan Dhamma dan mempertimbangkan konsekuensi bagi kesejahteraan bersama.

3) Welas Asih dan Kepedulian Sosial

Welas asih atau *karuṇā* mencerminkan kepedulian tulus terhadap kesejahteraan orang lain serta kepekaan terhadap kebutuhan sosial. Pemimpin berkewajiban memastikan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya (D.III.61). Kegagalan memenuhi tanggung jawab tersebut berdampak pada kemiskinan dan kemerosotan moral sosial (D.III.65-71). Prinsip *karuṇā* menempatkan kepemimpinan sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok rentan dan pencegahan ketidakadilan struktural. Indikator ini mencerminkan dimensi empati sosial dan tanggung jawab kolektif.

Indikator ini dalam Dasa Raja Dhamma merepresentasikan kedermawanan (*dāna*), kelembutan (*maddava*), dan tanpa kekerasan (*avihiṃsā*), yang secara bersama-sama mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan pihak lain, sikap tidak menindas, serta upaya mencegah penderitaan dalam pelaksanaan kepemimpinan.

4) Pelayanan Tanpa Pamrih

Pelayanan tanpa pamrih atau *sēvā* menempatkan kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian demi kesejahteraan bersama. Orientasi pelayanan menghindarkan pemimpin dari

keterikatan pada ambisi pribadi dan akumulasi materi (*D.II.2*). Kepemimpinan yang berlandaskan pengabdian dan kesederhanaan sejalan dengan pandangan bahwa pemimpin ideal mengutamakan welas asih dan tanggung jawab sosial (Dalai Lama, 2001:123). Prinsip ini diperkuat oleh konsep kepemimpinan spiritual yang menekankan altruisme dan integritas sebagai dasar budaya organisasi (Fry, 2003:695).

Indikator ini dalam Dasa Raja Dhamma merepresentasikan pengorbanan diri (*pariccāga*) dan kedermawanan (*dāna*), karena keduanya menempatkan kepentingan dan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi pemimpin.

5) Pengendalian Diri dan Stabilitas Emosi

Pengendalian diri merujuk pada kemampuan menjaga kestabilan batin dalam menghadapi tekanan dan konflik. Pemimpin yang mampu mengendalikan kemarahan dan kebencian akan menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan tidak merugikan pihak lain (*Dh.291*). Stabilitas emosi menjadi prasyarat kepemimpinan yang adil dan tidak reaktif. Indikator ini mencerminkan kematangan psikologis yang menopang kualitas kebijakan.

Indikator ini dalam Dasa Raja Dhamma merepresentasikan pengendalian diri (*tapa*), tidak mudah marah (*akkodha*), dan kesabaran (*khanti*), yang secara bersama-sama menggambarkan

kemampuan pemimpin menjaga kestabilan batin dan tidak bertindak secara reaktif ketika menghadapi tekanan maupun konflik.

6) Keteladanan dan Konsistensi Nilai

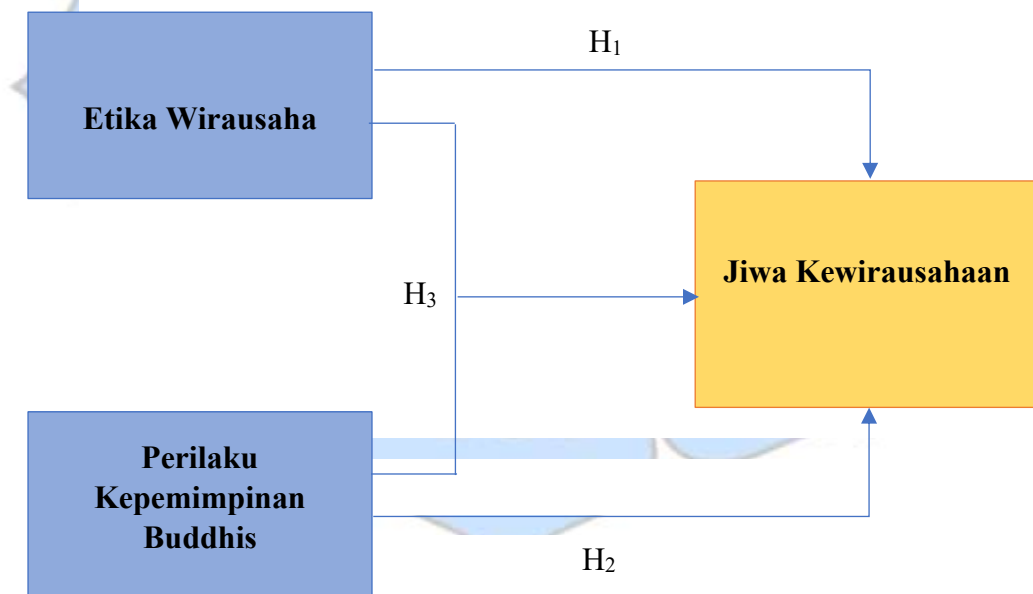
Keteladanan merujuk pada kemampuan pemimpin menjadi contoh hidup bagi anggota organisasi melalui konsistensi nilai dalam tindakan sehari-hari. Kepercayaan sosial tumbuh ketika pemimpin menunjukkan keselarasan antara prinsip yang diajarkan dan perilaku yang ditampilkan (*It.122*). Kepemimpinan yang konsisten pada nilai kebenaran menjaga stabilitas dan keharmonisan komunitas (*D.I.135*). Indikator ini merepresentasikan dimensi konsistensi Dharma serta penerapan konkret nilai moral dalam praktik kepemimpinan.

Indikator ini juga berkaitan dengan moralitas (*sīla*), kejujuran (*ājjava*), dan keteguhan dalam kebenaran (*avirodhana*) dalam Dasa Raja Dhamma, karena keteladanan pemimpin terbentuk melalui konsistensi dalam mempertahankan nilai moral, berkata dan bertindak secara jujur, serta tetap berpegang pada kebenaran dalam berbagai situasi.

C. Kerangka Berpikir

Jiwa kewirausahaan pada mahasiswa dipahami sebagai kesiapan individu dalam mengembangkan usaha secara mandiri, berani menghadapi risiko secara

rasional, serta konsisten bertindak kreatif dan bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Pembentukan kualitas tersebut tidak terlepas dari nilai moral yang dianut serta lingkungan kepemimpinan yang membentuk karakter. Etika wirausaha berperan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, sedangkan perilaku kepemimpinan Buddhis membentuk orientasi kebijaksanaan, welas asih, pengendalian diri, dan keteladanan moral. Kedua variabel tersebut diperkirakan memiliki pengaruh terhadap jiwa kewirausahaan mahasiswa, baik secara parsial maupun secara simultan, sebagaimana digambarkan dalam model penelitian berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti, 2026

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dirumuskan berdasarkan kerangka berpikir dan akan diuji melalui analisis statistik. Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H1:** Terdapat pengaruh etika wirausaha terhadap jiwa kewirausahaan mahasiswa Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha di STIAB Smaratungga.
- H2:** Terdapat pengaruh perilaku kepemimpinan Buddhis terhadap jiwa kewirausahaan mahasiswa Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha di STIAB Smaratungga.
- H3:** Terdapat pengaruh etika wirausaha dan perilaku kepemimpinan Buddhis secara simultan terhadap jiwa kewirausahaan mahasiswa Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha di STIAB Smaratungga.

